

STATISTIK KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG 2014



<http://lampung.bps.go.id>



STATISTIK KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG 2014



STATISTIK KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG 2014



STATISTIK KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG 2014

ISSN : 0126 – 4699
No. Publikasi : 18542.1504
Katalog BPS : 7203005.18
Ukuran Buku : 21 cm x 28 cm
Jumlah Halaman : viii + 76 halaman

Naskah:
Bidang Statistik Distribusi
BPS Provinsi Lampung

Gambar Kulit:
Bidang Statistik Distribusi
BPS Provinsi Lampung

Diterbitkan Oleh:
BPS Provinsi Lampung

<http://lampung.bps.go.id>

Boleh mengutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014, merupakan seri publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Publikasi ini memuat gambaran umum tentang sumber-sumber penerimaan maupun pos belanja Pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah kabupaten/kota. Data yang ditampilkan dalam publikasi ini adalah data realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2013 dan tahun 2014 Pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota.

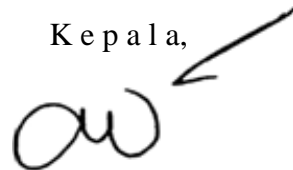
Sumber data statistik keuangan ini diperoleh dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Data tersebut dikumpulkan berdasarkan hasil survei keuangan daerah yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung dan Badan Pusat Statistik kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Semoga publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan konsumen data, khususnya data mengenai keuangan daerah.

Kritik dan saran guna perbaikan dan kesempurnaan publikasi ini dimasa mendatang masih kami harapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan publikasi ini, kami ucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, November 2015

BPS PROVINSI LAMPUNG

K e p a l a,



Ir. Adhi Wiriana, M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I. PENJELASAN UMUM	1
1.1. Pendahuluan	1
1.2. Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data	2
BAB II. KONSEP DAN DEFINISI.....	4
BAB III. ULASAN RINGKAS	11
3.1. Keuangan Daerah Provinsi Lampung	11
3.1.1. Pendapatan Pemerintah Provinsi Lampung.....	15
3.1.2. Belanja Pemerintah Provinsi Lampung.....	16
3.2. Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.....	19
3.2.1. Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.....	20
3.2.2. Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.....	21
3.3. Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.....	22
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Lampung, 2013 dan APBD Pemerintah Provinsi Lampung, 2014 (Juta Rupiah)	14
Tabel 3.2. Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Lampung 2014 (Juta Rupiah).....	15
Tabel 3.3. Distribusi Persentase Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Lampung Menurut Jenis Belanja, 2013-2014 (Juta Rupiah).....	18
Tabel 3.4. Perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, 2013-2014 (Juta Rupiah)	20
Tabel 3.5. Distribusi Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung menurut Jenis Belanja, 2013-2014	22
Tabel 1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Lampung, 2013-2014	25
Tabel 2. Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Lampung, 2013-2014.....	26
Tabel 3. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Provinsi Lampung, 2013-2014	27
Tabel 4. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, 2013-2014....	28
Tabel 5. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, 2013-2014	29
Tabel 6. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, 2013-2014	30
Tabel 7. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, 2013-2014 ..	31
Tabel 8. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, 2013-2014 ..	32
Tabel 9. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2013-2014	33
Tabel 10. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, 2013-2014.....	34
Tabel 11. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, 2013-2014 ...	35
Tabel 12. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2013-2014.....	36
Tabel 13. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2013-2014.....	37
Tabel 14. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mesuji, 2013-2014.....	38

Tabel 15. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2013-2014	39
Tabel 16. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2013-2014	40
Tabel 17. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2013-2014	41
Tabel 18. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Metro, 2013-2014	42
Tabel 19. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, 2013- 2014.....	43
Tabel 20. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, 2013-2014.....	44
Tabel 21. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tanggamus, 2013-2014	45
Tabel 22. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, 2013-2014.....	46
Tabel 23. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, 2013-2014.....	47
Tabel 24. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, 2013-2014.....	48
Tabel 25. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2013-2014.....	49
Tabel 26. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Way Kanan, 2013-2014.....	50
Tabel 27. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, 2013-2014	51
Tabel 28. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2013-2014.....	52
Tabel 29. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2013-2014.....	53
Tabel 30. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Mesuji, 2013-2014.....	54
Tabel 31. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2013-2014..	55
Tabel 32. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2013-2014.....	56
Tabel 33. Realisasi Belanja Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2013-2014.....	57
Tabel 34. Realisasi Belanja Pemerintah Kota Metro, 2013-2014.....	58
Tabel 35. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, 2013-2014.....	59
Tabel 36. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, 2013-2014.....	60
Tabel 37. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, 2013-2014.....	61

Tabel 38. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, 2013-2014	.62
Tabel 39. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, 2013-2014	..63
Tabel 40. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, 2013 – 201464
Tabel 41. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2013-2014	...65
Tabel 42. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, 2013-201466
Tabel 43. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, 2013-2014	...67
Tabel 44. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2013-201468
Tabel 45. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2013-201469
Tabel 46. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Mesuji, 2013-201470
Tabel 47. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2013-201471
Tabel 48. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2013-201472
Tabel 49. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2013-201473
Tabel 50. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kota Metro, 2013-201474
Tabel 51. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, 2013-201475

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Persentase Sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung, 2014	16
Gambar 3.2. Persentase Realisasi Belanja Daerah Provinsi Lampung, 2014.....	18
Gambar 3.3. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, 2014.....	21

<http://lampung.bps.go.id>

BAB I. PENJELASAN UMUM

1.1. Pendahuluan

Arah kebijakan keuangan daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta potensi daerah yang berpedoman pada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014, maka pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah tersebut dalam mengalokasikan APBD didasarkan pada program-program pembangunan yang disusun dengan perspektif kedepan sesuai dengan prosedur dan mekanisme mulai dari perencanaan di tingkat desa/kelurahan, kabupaten/kota, hingga provinsi.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan perlu ditingkatkan kemampuan mengelola dan kemampuan membangun daerah. Diantara kemampuan mengelola adalah mengelola APBD yang merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja, sehingga anggaran daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses perencanaan pembangunan daerah. Anggaran juga merupakan cermin finansial ekonomi masyarakat serta pilihan masyarakat. Selain itu anggaran belanja lebih diprioritaskan pada program dan kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat dan menjawab kebutuhan masyarakat serta pembangunan daerah. Alokasi belanja daerah diprioritaskan untuk percepatan implementasi program-program unggulan daerah seperti Infrastruktur Penghubung Jawa Sumatera (IPJS), Jalan Tol Terbanggi Bakauheni, dan lain-lain. Dalam pengelolaannya berpedoman kepada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis serta memperhatikan kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Publikasi statistik keuangan daerah Provinsi Lampung secara umum menyajikan data tentang pendapatan dan belanja pemerintah daerah Provinsi Lampung dan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung selama dua periode tahun anggaran.

Beberapa informasi penting yang dapat diperoleh dari statistik keuangan daerah Provinsi Lampung ini antara lain:

- a. Memberikan gambaran tentang realisasi APBD provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Untuk mengetahui potensi dan peranan sumber dana dari masing-masing daerah.
- c. Memberikan informasi bagi pemerintah pusat dalam menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan untuk masing-masing daerah.
- d. Sebagai salah satu indikator bagi swasta ataupun masyarakat untuk menanamkan investasi sesuai dengan potensi yang ada di daerah yang bersangkutan.

1.2. Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data

Data statistik keuangan daerah Provinsi Lampung diperoleh dari pemerintah daerah Provinsi Lampung dan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Data tersebut dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung dan Badan Pusat Statistik kabupaten/kota se-Provinsi Lampung secara sensus dengan menggunakan daftar K-1 dan K-2.

1.2.1. Statistik keuangan daerah tingkat provinsi

Pencacahan statistik keuangan daerah Provinsi Lampung dilakukan setiap tahun dengan menggunakan daftar K-1. Sumber data diperoleh dari Biro Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

- 1.2.2. Pencacahan keuangan daerah kabupaten/kota dilakukan secara lengkap di seluruh daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung dengan menggunakan daftar K-2. Sumber data diperoleh dari bagian keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di masing-masing kabupaten/kota.

1.2.3. Jenis daftar isian yang digunakan

Daftar K-1

Daftar ini digunakan untuk mencatat data statistik yang menyangkut realisasi keuangan daerah provinsi.

Daftar K-2

Daftar K-2 adalah jenis daftar yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang realisasi keuangan daerah kabupaten/kota.

<http://lampung.bps.go.id>

BAB II. KONSEP DAN DEFINISI

Realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota adalah realisasi pendapatan dan belanja daerah Provinsi Lampung pada tiap tahun anggaran.

Pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Dana perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan yang sah

PAD, adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya yang bersumber dari potensi daerah sendiri. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- **Pajak daerah**, adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaannya dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Pendapatan pajak daerah ditetapkan sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 yang pelaksanaannya diatur dengan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain : pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain.
- **Retribusi daerah**, yaitu pungutan daerah yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah secara langsung dan nyata kepada pengguna jasa atau fasilitas.

Retribusi daerah antara lain adalah pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, penggantian biaya cetak peta, pengujian kapal perikanan, pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan/atau pertokoan, penjualan produksi daerah, izin peruntukkan penggunaan tanah, izin trayek, dan lain-lain.

- **Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan**, adalah penerimaan hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya, dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.
- **Lain-lain PAD yang sah**, merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik kedalam pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai sifat pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut yang bertujuan untuk menunjang, melapangkan, dan/atau memantapkan suatu kebijakan daerah di bidang tertentu yang meliputi pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan, tuntutan ganti rugi, penerimaan lain-lain, hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, dan pendapatan denda pajak.

Dana Perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

- **Bagi Hasil Pajak:**

Bagi hasil pajak terdiri dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dan PPh pasal 21 orang pribadi, dan lain-lain.

- **Bagi Hasil Bukan Pajak :**

Bagi hasil bukan pajak terdiri dari Iuran Hak Penguasaan Hutan (IHPH), pemberian hak atas tanah negara, iuran tetap (*landrent*), iuran eksplorasi/eksploitasi/royalti, bagi hasil dari cukai tembakau, hasil pertambangan minyak bumi/gas alam, dan lain-lain.

- **DAU**

DAU adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

- **DAK**

DAK adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dana penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan yang sudah digariskan.

- **Lain-lain pendapatan yang sah**, adalah penerimaan lainnya dari pemerintah pusat dan/atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari bantuan dana kontijensi/penyeimbangan/penyesuaian dari pemerintah, dan dana darurat yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis *solvability*.

Kebijakan umum belanja daerah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Berpedoman pada prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan kota.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja penyelenggaraan urusan pilihan diprioritaskan pada kegiatan sektoral yang terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ditegaskan bahwa belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi *equitas* dana lancar dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Sesuai Permendagri tersebut telah ditentukan bahwa struktur belanja daerah terdiri dari ***belanja tidak langsung*** dan ***belanja langsung***.

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sulit diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Adapun yang termasuk dalam belanja tidak langsung adalah belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

- ***Belanja pegawai*** merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam belanja pegawai termasuk juga uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota

DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- **Belanja bunga** digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- **Belanja subsidi** digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Perusahaan/lembaga tertentu adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
- **Belanja hibah** digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- **Belanja bantuan sosial** digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif, dan memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya.
- **Belanja bagi hasil** digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- **Belanja bantuan keuangan** digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota

kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

- ***Belanja tidak terduga*** merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat di daerah.

Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Kelompok belanja langsung ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja yang bersifat strategis, dengan nilai yang besar, dapat dilaksanakan dengan menetapkan belanja *multi years* dan/atau *turn key* yang pengalokasian dananya disepakati oleh DPRD.

- ***Belanja pegawai*** dalam hal ini untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- ***Belanja barang dan jasa*** digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari duabelas bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.
- ***Belanja modal*** digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai

nilai manfaat lebih dari duabelas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan daerah baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dengan maksud menutup defisit atas memanfaatkan surplus anggaran.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

BAB III. ULASAN RINGKAS

Sebagai instrumen kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalam pembangunan daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besaran pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran dimasa-masa yang akan datang, sumber pengembangan, ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

APBD pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dapat dipakai juga sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah, serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang transparan, berorientasi pada kepentingan, dan akuntabilitas publik. Dengan demikian APBD harus dirancang untuk mengarahkan alokasi dana yang membiayai berbagai program dan kegiatan sehingga dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan kepuasan publik (*public satisfaction*) sebagai wujud pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik, sehingga pembangunan daerah yang efektif dan efisien dapat dicapai.

Sejak tahun 2002, kebijakan keuangan daerah yang tercermin dalam APBD didasarkan kepada pendekatan kinerja, yaitu suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan. Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Dengan diterapkannya sistem anggaran tersebut, maka format APBD juga mengalami perubahan terutama di sisi belanja daerah.

3.1. Keuangan Daerah Provinsi Lampung

Dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Provinsi Lampung tahun 2014, pemerintah daerah telah mencapai kemajuan walaupun masih banyak kendala dan

tantangan yang dihadapi. Kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan APBD merupakan gambaran langkah konkret pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dan situasi perekonomian yang cenderung belum stabil. Hal tersebut terlihat pada laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang mengalami perlambatan sebesar 5,08 persen (yoy) lebih rendah dibandingkan tahun 2013 yang tumbuh 5,78 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan nasional yang tumbuh 5,02 persen (yoy). Beberapa penyebab perlambatan adalah perlambatan pertumbuhan ekspor dan perlambatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. (BPS Provinsi Lampung, 2015).

Untuk itu otonomi daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah mengatur keuangan daerahnya harus dimanfaatkan dalam konteks memberikan pelayanan yang lebih, bukan dengan pembebanan pajak yang semakin meningkat yang bisa memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.

Berbagai cara dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dalam upaya pemenuhan pembiayaan pelayanan publiknya. *Pertama*, pemerintah daerah memperoleh dana dari sumber-sumber yang dikategorikan PAD. *Kedua*, memperoleh transfer dana dari APBN yang dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU, dan DAK. Pengalokasian dana perimbangan ini selain ditujukan untuk memberikan kepastian sumber pendapatan bagi APBD, juga bertujuan untuk mengurangi/memperkecil perbedaan kapasitas fiskal antar daerah. *Ketiga*, daerah memperoleh penerimaan dari sumber lainnya seperti bantuan dana kontingensi dan bantuan dana darurat. *Keempat*, menerima pinjaman dari dalam dan luar negeri.

Sesuai dengan arah kebijakan PAD pemerintah Provinsi Lampung, menetapkan hal sebagai berikut :

- Dalam menetapkan PAD mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun sebelumnya, perkiraan ekonomi tahun 2014 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan terkait peraturan perundang-undangan.
- Pemerintah memberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi pelaku ekonomi dan tidak membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan

retribusi daerah, rasionalisasi pajak daerah dan retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD.

- Dalam hal jenis pajak daerah dan retribusi daerah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

(Pemerintah Provinsi Lampung, 2015).

Dalam merumuskan target anggaran pendapatan pemerintah Provinsi Lampung, cenderung menentukan target minimal dari sumber PAD. Dengan adanya kenaikan penerimaan dana perimbangan, maka pendapatan daerah pemerintah Provinsi Lampung tahun 2014 yang ditargetkan sebesar 4,57 trilyun rupiah, lebih tinggi dari penerimaan yang diperoleh pada tahun 2013 yaitu 3,93 trilyun rupiah atau naik 16,59 persen. Karena masih berupa rancangan, maka belum tentu sama dengan realisasinya, bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Jika perkiraan penerimaan lebih besar dari realisasinya, menyebabkan ada kegiatan yang telah direncanakan diawal tahun tidak dapat diselesaikan atau mungkin tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedianya anggaran. Hal ini menjadikan kinerja keuangan daerah menjadi kurang baik.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sejak tahun 2001 transfer dana dari APBN ke daerah dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan dari pemerintah pusat tahun 2014 dianggarkan mencapai 1,53 trilyun rupiah mengalami kenaikan 10,81 persen dari tahun 2013 yaitu sebesar 1,38 trilyun rupiah. Dana perimbangan cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan struktur belanja pemerintah daerah, belanja tidak langsung dianggarkan mencapai 2,24 trilyun rupiah mengalami kenaikan 23,62 persen dari tahun 2013 yaitu sebesar 1,81 trilyun rupiah. Sementara itu, belanja langsung tahun 2014 dianggarkan oleh pemerintah pusat mencapai 2,37 trilyun rupiah yang naik 14,65 persen dari tahun 2013 yaitu sebesar 2,07 trilyun rupiah. (Tabel 3.1).

Tabel 3.1. Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Lampung, 2013 dan APBD Pemerintah Provinsi Lampung, 2014 (Juta Rupiah)

Rincian	Realisasi 2013	Anggaran 2014	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
PENERIMAAN DAERAH	3 925 661,24	4 576 791,05	16,59
Pendapatan Daerah	3 901 950,62	4 576 791,05	17,29
Pendapatan Asli Daerah	1 771 297,94	2 258 133,10	27,48
Dana Perimbangan	1 384 043,54	1 533 653,38	10,81
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	746 609,14	785 004,56	5,14
Penerimaan Pembiayaan	23 710,62	0,00	100,00
PENGELUARAN DAERAH	3 884 534,95	4 617 907,56	18,88
Belanja Tidak Langsung	1 811 879,22	2 239 758,36	23,62
Belanja Langsung	2 072 655,73	2 376 219,20	14,65
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	1 930,00	100,00

Perubahan dalam perencanaan anggaran suatu pemerintahan tidak selalu berdampak negatif. Hal tersebut dapat menyesuaikan situasi perekonomian, dan kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah. Selain itu, optimalisasi dalam memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber penerimaan dapat mencapai target penerimaan yang telah dianggarkan. Hal ini juga terlihat pada rancangan APBD Provinsi Lampung Tahun 2014. Dari rencana penerimaan sebesar 4,57 trilyun rupiah, dalam realisasinya diperoleh 4,56 trilyun rupiah atau mengalami penurunan 0,20 persen. Penurunan yang terjadi disebabkan oleh beberapa komponen pendukung pendapatan daerah yang turun seperti dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah masing-masing turun 3,99 persen dan 0,72 persen. Sedangkan PAD tidak mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebesar 0,73 persen. (Tabel 3.2).

Dari sisi pengeluaran, realisasi pengeluaran daerah lebih rendah dari yang dianggarkan tahun 2014. Hal tersebut terlihat pada perubahan komponen pendukungnya seperti belanja langsung dan belanja tidak langsung yang juga mengalami penurunan. Realisasi belanja tidak langsung turun 4,25 persen menjadi 2,14 trilyun rupiah dari 2,24 trilyun rupiah yang dianggarkan. Sementara itu realisasi belanja langsung juga mengalami penurunan sebesar 2,80 persen dari rencana anggaran 2,37 trilyun rupiah menjadi 2,31 trilyun rupiah.

**Tabel 3.2. Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Lampung
2014 (Juta Rupiah)**

Rincian	Anggaran	Realisasi	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
PENERIMAAN DAERAH	4 576 791,05	4 567 673,50	(0,20)
Pendapatan Daerah	4 576 791,05	4 526 532,29	(1,10)
Pendapatan Asli Daerah	2 258 133,10	2 274 685,57	0,73
Dana Perimbangan	1 533 653,38	1 472 486,57	(3,99)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	785 004,56	779 360,15	(0,72)
Penerimaan Pembiayaan	0,00	41 141,21	100,00
PENGELUARAN DAERAH	4 617 907,56	4 456 117,31	(3,50)
Belanja Tidak Langsung	2 239 758,36	2 144 560,81	(4,25)
Belanja Langsung	2 376 219,20	2 309 626,50	(2,80)
Pengeluaran Pembiayaan	1 930,00	1 930,00	0,00

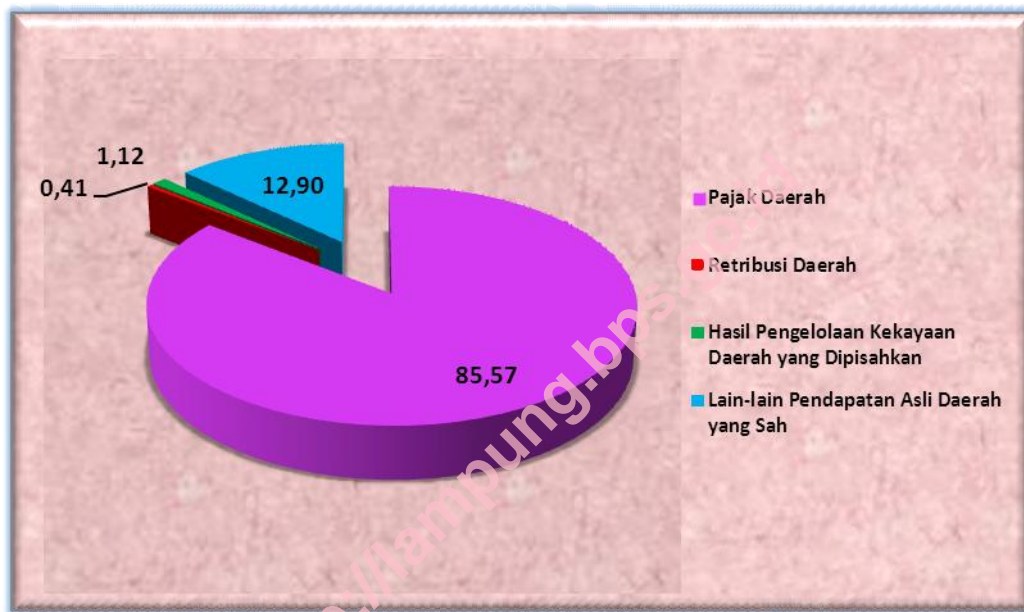
3.1.1. Pendapatan Pemerintah Provinsi Lampung

Dari ketiga sumber pendapatan daerah, PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi daerah karena pendapatan ini bersumber dari potensi daerah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, daerah mempunyai kewenangan penuh untuk memanfaatkan PAD sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Penerimaan PAD Provinsi Lampung tahun 2014 lebih besar 22,13 persen dari 1,77 trilyun rupiah tahun 2013 menjadi 2,27 trilyun rupiah. Tahun 2014, persentase sumber pendapatan dari PAD lebih tinggi dibandingkan dengan dana perimbangan yaitu 50,25 persen. (Diolah dari Tabel 3.1 Kolom 2 dan Tabel 3.2 Kolom 3).

Untuk mengukur dan menilai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan wilayahnya dapat dibandingkan antara realisasi penerimaan PAD dan total realisasi pendapatan yang dapat didefinisikan dengan rasio. Makin besar rasio yang dihasilkan maka pemerintah daerah makin mandiri dalam membiayai pembangunan di wilayahnya. Makin kecil angka rasio berarti makin besar tingkat ketergantungan

pemerintah daerah kepada pemerintah pusat/pihak lain. Ditinjau dari rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, Provinsi Lampung pada tahun 2014 sumbangan PAD terhadap total pendapatan dalam menyediakan dana pembangunan masih lebih besar dibandingkan tahun 2013 dengan nilai rasio sebesar 50,25 persen yang menunjukkan tingkat kemandirian Provinsi Lampung semakin baik. (Diolah dari Tabel 3.2 Kolom 3).

Gambar 3.1. Persentase Sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung 2014



Dari Gambar 3.1 tampak bahwa sumber pendapatan asli daerah Provinsi Lampung dari penerimaan pajak daerah tahun 2014 merupakan sumber yang paling dominan yaitu 85,57 persen. Retribusi yang merupakan bentuk penerimaan atas penggunaan fasilitas/pelayanan yang diberikan pemerintah Provinsi Lampung kepada masyarakat, hanya memberikan sumbangan terhadap PAD sebesar 0,41 persen. Rendahnya sumbangan retribusi daerah terhadap anggaran pendapatan daerah bisa terjadi karena pada saat perencanaan pemerintah kurang memiliki informasi sektor mana yang diperkirakan masyarakat akan banyak menggunakan fasilitas/pelayanan pemerintah.

3.1.2. Belanja Pemerintah Provinsi Lampung

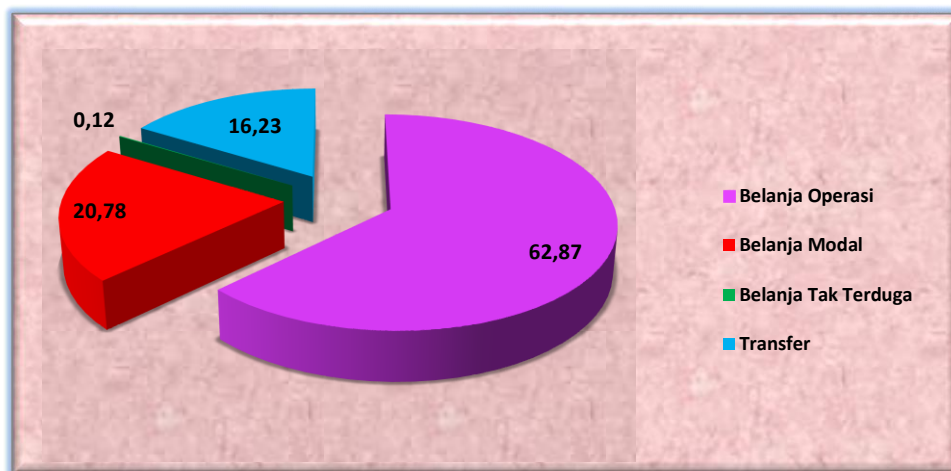
Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi *equitas* dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa. Dilihat dari proporsinya terhadap realisasi belanja daerah tahun 2014, belanja operasi mendominasi pengeluaran pemerintah Provinsi Lampung sebesar 62,87 persen. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor komponen pendukung belanja operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja hibah yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya masing-masing sebesar 9,23 persen; 9,15 persen; dan 11,35 persen. Sedangkan komponen pendukung lainnya mengalami penurunan seperti belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan masing-masing turun sebesar 17,01 persen dan 88,15 persen. (Gambar 3.2 dan Diolah dari Tabel 2 lampiran).

Seperti halnya pemanfaatan anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan baik itu rutin maupun fisik. Hal ini terlihat dari rasio belanja operasi terhadap total belanja dengan membandingkan total realisasi belanja operasi dengan total belanja keseluruhan. Rasio belanja operasi pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014 sebesar 62,88 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan rutin dibandingkan untuk kegiatan pembangunan fisik. (Diolah dari Tabel 2 lampiran).

Dalam mengukur pembangunan infrastruktur, pemerintah Provinsi Lampung masih perlu melakukan perbaikan dan menjadi perhatian. Terlihat dari rasio modal terhadap total belanja yaitu sebesar 20,78 persen. Hal tersebut menunjukkan persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik infrastruktur masih perlu ditingkatkan. (Diolah dari Tabel 2 lampiran).

Gambar 3.2. Persentase Realisasi Belanja Daerah Provinsi Lampung, 2014



Dilihat dari kontribusinya, dibandingkan dengan tahun 2013 belanja tidak langsung tahun 2014 mengalami kenaikan. Jika tahun 2013 kontribusinya dalam belanja daerah yaitu 46,64 persen, maka tahun 2014 kontribusi belanja tidak langsung yaitu 48,15 persen (Tabel 3.3). Dengan naiknya *share* belanja tidak langsung tahun 2014, hal ini berarti pemerintah cenderung kurang mengalokasikan dananya untuk belanja yang terkait erat dengan upaya peningkatan ekonomi.

Tabel 3.3. Distribusi Persentase Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Lampung Menurut Jenis Belanja, 2013-2014 (Juta Rupiah)

Jenis Belanja	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	100,00	100,00
Belanja Tidak Langsung	46,64	48,15
Belanja Pegawai	12,81	12,22
Belanja Hibah	19,59	19,03
Belanja Bantuan Sosial	0,14	0,10
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	9,20	16,23
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	4,38	0,45
Belanja Tidak Terduga	0,52	0,12
Belanja Langsung	53,36	51,85
Belanja Pegawai	2,59	2,45
Belanja Barang dan Jasa	30,07	28,62
Belanja Modal	20,70	20,78

3.2. Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

Pembentukan pemekaran daerah kabupaten/kota sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dengan pemekaran daerah pemerintah akan lebih memahami kebutuhan masyarakat setempat. Dengan asumsi bahwa semakin dekat pusat pengambilan keputusan dengan masyarakat, semakin memahami kebutuhan masyarakat setempat, yang pada gilirannya akan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2014, penerimaan daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung tahun 2014 juga mengalami peningkatan. Dibandingkan tahun 2013, penerimaan daerah tahun 2014 naik 10,17 persen dari 3,93 trilyun rupiah menjadi 4,32 trilyun rupiah. Kenaikan tertinggi diperoleh dari sumber PAD yang naik 13,21 persen dari 1,77 trilyun rupiah menjadi 2,01 trilyun rupiah di tahun 2014. Sedangkan kenaikan terendah diperoleh dari Dana perimbangan yang naik 6,35 persen dari 1,38 trilyun rupiah menjadi 1,47 trilyun rupiah di tahun 2014. (Tabel 3.4).

Dibandingkan dengan penerimaan daerah, pengeluaran daerah tahun 2014 mengalami peningkatan 11,33 persen atau mencapai 4,32 trilyun rupiah dari sekitar 3,88 trilyun rupiah tahun 2013. Apabila dilihat dari strukturnya, kenaikan belanja tidak langsung mengalami peningkatan hingga mencapai 15,98 persen. Adapun belanja langsung yang terkait dengan program tahun 2014 naik 6,95 persen. Peningkatan belanja langsung berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang sangat diperlukan karena merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa jalan menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat semakin terbuka karena anggaran lebih diprioritaskan untuk belanja langsung.

Optimalisasi penggunaan anggaran belanja daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung terhadap realisasi belanja tahun 2014 dapat dilihat dari rasio belanja operasi yang digunakan untuk membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan fisik. Rasio belanja operasi kabupaten/kota se-Provinsi Lampung sebesar 78,80 persen menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat rutin dibandingkan untuk kegiatan pembangunan fisik. Rasio belanja operasi tertinggi yaitu Kabupaten Lampung Timur sebesar 85,82 persen, diikuti Kabupaten

Pringsewu sebesar 84,57 persen, dan Kabupaten Lampung Selatan sebesar 83,61 persen. Sementara itu rasio belanja operasi terendah yaitu Kabupaten Mesuji sebesar 69,28 persen. (Diolah dari Tabel 35 lampiran).

Tabel 3.4. Perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, 2013-2014 (Juta Rupiah)

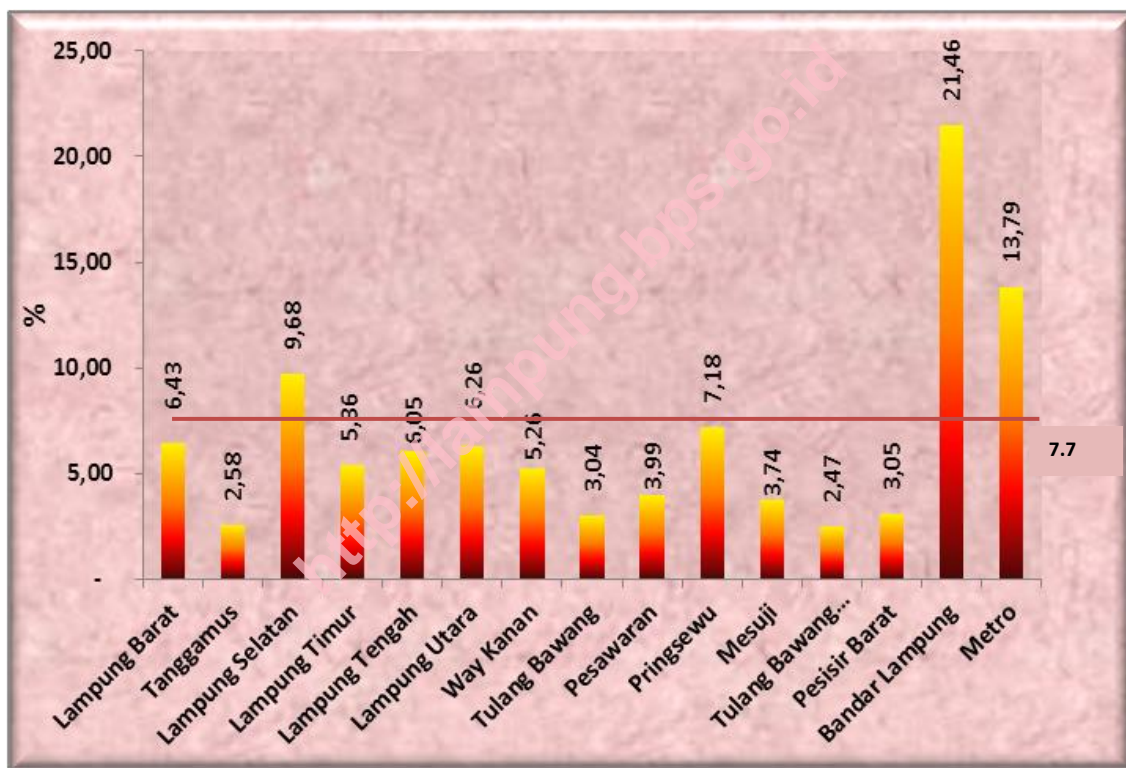
Rincian	2013	2014	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
PENERIMAAN DAERAH	3 925 661 229,00	4 324 705 382,00	10,17
Pendapatan Daerah	3 901 950 614,00	4 298 707 767,00	10,17
Pendapatan Asli Daerah	1 771 297 935,00	2 005 245 670,00	13,21
Dana Perimbangan	1 384 043 537,00	1 471 956 084,00	6,35
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	746 609 142,00	821 506 013,00	10,03
Penerimaan Pembiayaan	23 710 615,00	25 997 615,00	9,65
PENGELUARAN DAERAH	3 884 534 954,00	4 324 705 382,00	11,33
Belanja Tidak Langsung	1 811 879 220,00	2 101 431 890,00	15,98
Belanja Langsung	2 072 655 734,00	2 216 773 492,00	6,95
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	6 500 000,00	100,00

3.2.1. Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

Kontribusi PAD dalam APBD merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan terwujud jika daerah mampu meningkatkan pelayanan dan membiayai pembangunan dari sumber pembiayaan sendiri. Dengan adanya pemekaran wilayah, pemerintah kabupaten/kota optimis mampu meningkatkan PAD, hal ini terlihat dari penerimaan pada pos PAD yang naik hingga 33,09 persen dibandingkan tahun 2013 yaitu dari 882 milyar rupiah menjadi 1,17 trilyun rupiah. Akan tetapi dengan rasio PAD terhadap total pendapatan yang hanya mencapai 7,74 persen menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pemerintah kabupaten/kota masih rendah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. (Tabel 3.4 dan diolah dari Tabel 19 lampiran).

Dari lima belas kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung memiliki rasio PAD tertinggi yaitu 21,46 persen sementara Kabupaten Tulang Bawang Barat rasio PAD-nya paling rendah yaitu 2,47. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung memiliki kemandirian daerah yang paling baik dibanding kabupaten/kota lain. Tingginya kemandirian Kota Bandar Lampung disebabkan oleh tingginya sumber-sumber PAD khususnya dari pajak daerah dan retribusi daerah. (Gambar 3.3).

Gambar 3.3. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, 2014



3.2.2. Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

Pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2014 meningkatkan kontribusi belanja tidak langsung dari 55,04 persen tahun 2013 menjadi 55,66 persen. Sementara itu, untuk belanja langsung pemerintah kabupaten/kota justru mengurangi kontribusinya dari 44,96 persen tahun 2013 menjadi 44,34 persen tahun 2014. Hal tersebut disebabkan komponen belanja modal yang dapat memberikan output lebih bagi pemerintah kabupaten/kota turun menjadi 21,06 persen dari 22,60 persen pada tahun 2013. Dari Tabel 3.5, terlihat rasio belanja pegawai terhadap total belanja masih cukup besar yaitu 50,62 persen tahun 2013 dan 51,15 persen tahun 2014. Hal ini menunjukkan pemerintah kabupaten/kota masih

memiliki kecenderungan mengalokasikan dananya untuk belanja yang sifatnya untuk pendanaan aparatur negara. Apabila pola seperti ini berlanjut untuk waktu yang cukup lama, tujuan adanya pemekaran wilayah untuk mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat akan sulit dicapai.

Tabel 3.5. Distribusi Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung menurut Jenis Belanja, 2013-2014

Jenis Belanja	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	100	100
Belanja Tidak Langsung	55,04	55,66
Belanja Pegawai	50,62	51,15
Belanja Bunga	0,03	0,04
Belanja Subsidi	0,00	0,01
Belanja Hibah	1,45	1,34
Belanja Bantuan Sosial	0,46	0,38
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,01	0,01
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2,31	2,65
Belanja Tidak Terduga	0,17	0,09
Belanja Langsung	44,96	44,34
Belanja Pegawai	4,79	4,95
Belanja Barang dan Jasa	17,57	18,33
Belanja Modal	22,60	21,06

3.3. Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Daerah Provinsi Lampung

Diterapkannya otonomi daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah setempat untuk menggali potensi-potensi sumber keuangan di daerahnya sekaligus dapat mengalokasikan sumber daya kebelanja daerah sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerahnya. Semakin banyak sumber-sumber keuangan yang berhasil digali di suatu daerah, maka hal ini akan meningkatkan pendapatan daerah yang semestinya diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik. Andaiyani (2013) menyatakan bahwa kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik mempengaruhi besarnya belanja modal. Sehingga pemerintah daerah

seharusnya melakukan pergeseran komposisi belanja yang nantinya dapat meningkatkan kepercayaan publik.

Pertumbuhan ekonomi semestinya mampu mendorong pembangunan daerah yang nantinya dapat meningkatnya alokasi belanja modal daerah. Hal ini senada dengan Taiwo & Abayomi (2011) yang mengatakan bahwa antara pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal memiliki hubungan positif. Selama tahun 2012 – 2014, pertumbuhan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada PDRB menurut pengeluaran Provinsi Lampung mengalami peningkatan dari 60,10 miliar rupiah (32,08 persen dari PDRB) pada tahun 2012 menjadi 71,01 miliar rupiah (30,74 persen dari PDRB) pada tahun 2014 dengan rata-rata peningkatan setiap tahunnya sebesar 31,51 persen. (BPS Provinsi Lampung, 2015). Proporsi pertumbuhan komponen PMTB terhadap PDRB cenderung turun. Hal tersebut sejalan dengan rasio belanja modal terhadap total belanja APBD, pada tahun 2012 sebesar 21,68 persen dan cenderung menurun hingga tahun 2014 sebesar 20,77 persen. Sehingga jika pemerintah ingin memperkuat pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan meningkatkan rasio belanja modal pada anggaran belanja daerah. (Diolah dari Tabel 2 lampiran).

TABEL – TABEL LAMPIRAN

<http://lampung.bps.go.id>

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Lampung, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	3 901 950 613,81	4 526 532 292,01
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1 771 297 934,86	2 274 685 572,91
Pajak Daerah	1 547 336 214,79	1 946 452 924,02
Retribusi Daerah	8 672 978,78	9 253 336,15
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25 144 918,79	25 462 864,86
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	190 143 822,50	293 516 447,88
DANA PERIMBANGAN	1 384 043 537,03	1 472 486 568,52
Bagi Hasil Pajak	145 424 014,03	142 641 116,84
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	117 848 110,00	144 940 790,68
Dana Alokasi Umum (DAU)	1 060 663 183,00	1 136 053 041,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	60 108 230,00	48 851 620,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	746 609 141,92	779 360 150,58
Pendapatan Hibah	22 430 145,82	22 926 122,48
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	724 178 996,10	748 609 106,10
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	7 824 922,00

Tabel 2. Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Lampung, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	3 884 534 954,00	4 454 187 317,37
Belanja Tidak Langsung	1 811 879 220,00	2 144 560 814,84
Belanja Pegawai	497 662 948,00	544 114 849,55
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	761 045 629,00	847 424 324,45
Belanja Bantuan Sosial	5 448 514,00	4 521 800,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	357 471 263,00	723 095 812,55
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	170 214 409,00	20 173 866,28
Belanja Tidak Terduga	20 036 457,00	5 230 162,00
Belanja Langsung	2 072 655 734,00	2 309 626 502,54
Belanja Pegawai	100 476 762,00	109 214 896,33
Belanja Barang dan Jasa	1 168 089 647,00	1 274 956 923,03
Belanja Modal	804 089 325,00	925 454 683,17

Tabel 3. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Provinsi Lampung, 2013-2014

(000 Rp)

Jenis Pembiayaan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	23 710 615,00	39 211 205,08
Penerimaan Pembiayaan Daerah	23 710 615,00	41 141 205,08
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	23 710 615,00	41 141 205,08
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	1 930 000,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	1 930 000,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	41 126 275,34	111 556 179,71

Tabel 4. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	854 217 650,87	634 237 104,48
PENDAPATAN ASLI DAERAH	33 829 813,86	40 800 358,95
Pajak Daerah	4 181 820,82	5 754 256,70
Retribusi Daerah	7 752 960,45	1 779 453,56
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2 851 756,20	3 068 337,25
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	19 043 276,39	30 198 311,44
DANA PERIMBANGAN	693 467 851,15	499 309 896,53
Bagi Hasil Pajak	45 630 494,15	28 484 759,53
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	558 555 207,00	388 754 357,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	89 282 150,00	82 070 780,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	126 919 985,86	94 126 849,01
Pendapatan Hibah	28 186 303,00	3 000 000,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	19 113 428,86	34 858 642,01
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	69 620 254,00	56 268 207,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10 000 000,00	0,00

Tabel 5. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	883 820 290,00	872 588 834,43
PENDAPATAN ASLI DAERAH	22 017 450,00	22 488 697,78
Pajak Daerah	7 257 570,00	9 143 084,55
Retribusi Daerah	2 257 466,00	3 969 096,65
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 176 248,00	3 294 264,86
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9 326 166,00	6 082 251,72
DANA PERIMBANGAN	718 182 723,00	804 442 823,02
Bagi Hasil Pajak	28 897 125,00	23 386 775,87
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	17 289 293,00	27 112 031,15
Dana Alokasi Umum (DAU)	600 816 655,00	669 512 156,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	71 179 650,00	84 431 860,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	143 620 117,00	45 657 313,63
Pendapatan Hibah	0,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	20 043 385,00	45 657 313,63
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10 000 000,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	113 576 732,00	151 336 264,67

Tabel 6. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 198 779 827,03	1 348 589 997,90
PENDAPATAN ASLI DAERAH	100 050 587,68	130 597 526,74
Pajak Daerah	40 882 281,85	37 707 645,62
Retribusi Daerah	20 092 411,11	13 014 162,92
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6 252 663,26	6 318 642,72
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	32 823 231,46	73 557 075,48
DANA PERIMBANGAN	900 885 085,34	993 329 427,60
Bagi Hasil Pajak	36 109 332,42	28 136 399,08
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	17 726 138,92	21 064 307,53
Dana Alokasi Umum (DAU)	769 867 834,00	847 657 151,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	77 181 780,00	96 471 570,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	197 844 154,01	224 663 043,56
Pendapatan Hibah	0,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	28 548 992,01	62 406 896,56
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	139 295 162,00	162 256 147,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	30 000 000,00	0,00

Tabel 7. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 366 894 069,59	1 550 572 554,24
PENDAPATAN ASLI DAERAH	40 761 198,16	83 131 971,56
Pajak Daerah	13 669 599,29	24 379 040,98
Retribusi Daerah	4 542 174,62	5 618 163,73
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1 971 382,89	1 947 448,21
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	20 578 041,36	51 187 318,64
DANA PERIMBANGAN	1 073 833 635,83	1 156 884 045,51
Bagi Hasil Pajak	81 815 932,22	0,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	69 497 328,61	150 380 012,51
Dana Alokasi Umum (DAU)	860 136 385,00	940 041 243,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	62 383 990,00	66 462 790,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	252 299 235,60	310 556 537,17
Pendapatan Hibah	0,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	37 616 612,13	60 035 523,77
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	214 682 623,47	250 521 013,40
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00

Tabel 8. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 613 953 783,00	1 789 233 628,03
PENDAPATAN ASLI DAERAH	81 780 244,00	108 180 987,62
Pajak Daerah	38 326 654,00	40 290 414,76
Retribusi Daerah	7 964 820,00	33 673 876,08
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6 350 501,00	6 427 622,38
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	29 138 269,00	27 789 074,40
DANA PERIMBANGAN	1 251 072 112,00	1 329 265 207,22
Bagi Hasil Pajak	54 117 266,00	42 669 940,43
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	17 644 967,00	25 612 484,78
Dana Alokasi Umum (DAU)	1 086 335 279,00	1 177 513 282,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	92 974 600,00	83 469 500,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	281 101 427,00	351 787 433,20
Pendapatan Hibah	0,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	32 745 365,00	76 736 498,20
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	247 981 062,00	275 050 935,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	375 000,00	0,00

Tabel 9. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 114 467 058,11	1 292 431 677,52
PENDAPATAN ASLI DAERAH	46 626 054,96	80 918 349,92
Pajak Daerah	10 701 983,08	16 190 430,17
Retribusi Daerah	16 324 815,30	4 775 117,04
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4 082 396,58	5 359 031,05
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15 516 860,00	54 593 771,66
DANA PERIMBANGAN	896 610 922,06	973 140 651,23
Bagi Hasil Pajak	29 965 921,32	24 293 307,87
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	13 271 516,74	20 870 344,36
Dana Alokasi Umum (DAU)	761 218 384,00	838 661 589,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	92 155 100,00	89 315 410,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	171 230 081,09	238 372 676,37
Pendapatan Hibah	0,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	23 722 693,12	52 767 170,49
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	137 835 471,59	185 605 505,88
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	7 500 000,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2 171 916,38	0,00

Tabel 10. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	778 377 731,71	871 294 716,36
PENDAPATAN ASLI DAERAH	24 831 167,99	45 811 422,79
Pajak Daerah	7 304 111,16	13 836 375,47
Retribusi Daerah	7 902 692,01	19 320 790,90
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1 638 283,81	2 454 645,54
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7 986 081,01	10 199 610,88
DANA PERIMBANGAN	651 613 183,34	701 026 300,81
Bagi Hasil Pajak	32 265 052,19	24 470 755,99
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	17 197 625,15	21 170 453,82
Dana Alokasi Umum (DAU)	517 219 746,00	573 114 161,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	84 930 760,00	82 270 930,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	101 933 380,38	124 456 992,77
Pendapatan Hibah	0,00	0,00
Dana Darurat	0,00	
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	27 702 524,38	45 650 925,77
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	74 230 856,00	78 804 967,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Lainnya	3 600,00	1 100,00

Tabel 11. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	688 379 955,75	804 796 952,53
PENDAPATAN ASLI DAERAH	36 242 825,98	24 444 892,15
Pajak Daerah	6 499 367,93	13 175 797,96
Retribusi Daerah	19 804 396,00	2 915 095,52
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 483 656,75	3 520 417,06
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6 455 405,30	4 833 581,62
DANA PERIMBANGAN	593 814 060,84	649 804 534,37
Bagi Hasil Pajak	44 759 774,65	35 082 992,23
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	13 527 656,19	21 679 798,14
Dana Alokasi Umum (DAU)	482 230 950,00	533 313 684,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	53 295 680,00	59 728 060,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	58 323 068,93	130 547 526,00
Pendapatan Hibah	0,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	8 517 987,34	48 921 632,11
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Lainnya	49 805 081,59	81 625 893,89

Tabel 12. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	782 644 598,28	913 575 380,53
PENDAPATAN ASLI DAERAH	25 933 059,04	36 482 436,46
Pajak Daerah	6 041 572,49	8 154 156,96
Retribusi Daerah	1 885 582,61	1 854 086,44
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	162 262,20	245 351,32
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17 843 641,74	26 228 841,74
DANA PERIMBANGAN	642 231 250,59	739 876 226,10
Bagi Hasil Pajak	19 985 422,46	14 620 113,67
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	17 322 823,13	20 957 158,43
Dana Alokasi Umum (DAU)	538 309 950,00	625 845 694,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	66 613 055,00	78 453 260,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	114 480 288,65	137 216 717,97
Pendapatan Hibah	0,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	30 604 140,65	39 987 237,97
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	83 876 148,00	97 229 480,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00

Tabel 13. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	784 516 227,00	881 912 476,11
PENDAPATAN ASLI DAERAH	30 421 121,00	63 339 740,42
Pajak Daerah	8 476 107,00	11 279 888,98
Retribusi Daerah	2 446 590,00	2 299 715,26
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	43 412,00	450 754,72
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	19 455 012,00	49 309 381,46
DANA PERIMBANGAN	592 098 364,00	632 686 845,28
Bagi Hasil Pajak	17 642 063,00	16 998 922,27
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	17 492 653,00	20 833 427,02
Dana Alokasi Umum (DAU)	499 454 898,00	547 622 366,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	57 508 750,00	47 232 130,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	161 996 742,00	185 885 890,40
Pendapatan Hibah	0,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	16 130 107,00	35 618 895,40
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	125 828 974,00	150 266 995,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	20 000 000,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	37 661,00	0,00

Tabel 14. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mesuji, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	464 241 865,59	558 296 638,63
PENDAPATAN ASLI DAERAH	10 021 181,59	20 901 990,43
Pajak Daerah	1 186 116,00	4 321 789,59
Retribusi Daerah	1 492 603,00	3 942 802,18
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	402 635,73	406 884,44
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6 939 826,86	12 230 514,24
DANA PERIMBANGAN	413 956 697,00	476 213 538,98
Bagi Hasil Pajak	18 115 279,00	13 986 195,34
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	17 113 392,00	22 723 313,64
Dana Alokasi Umum (DAU)	338 570 276,00	387 694 110,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	40 157 750,00	51 809 920,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	40 263 987,00	61 181 109,21
Pendapatan Hibah	0,00	2 000 000,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	5 780 384,00	32 174 793,21
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	19 483 603,00	27 006 316,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	15 000 000,00	0,00

**Tabel 15. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
2013-2014**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	562 451 471,82	624 649 941,27
PENDAPATAN ASLI DAERAH	10 345 128,35	15 436 104,69
Pajak Daerah	5 756 423,66	6 788 944,97
Retribusi Daerah	882 736,26	1 195 256,30
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	201 317,87	406 884,44
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3 504 650,56	7 045 018,99
DANA PERIMBANGAN	464 258 951,25	509 035 368,24
Bagi Hasil Pajak	17 624 730,45	13 395 650,39
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	17 072 882,80	20 805 783,84
Dana Alokasi Umum (DAU)	380 947 218,00	424 389 404,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	48 614 120,00	50 444 530,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	87 847 392,22	100 178 468,34
Pendapatan Hibah	1 000 000,00	1 500 000,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	14 873 656,22	33 853 630,05
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	46 973 736,00	59 026 620,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	25 000 000,00	0,00
Lainnya	5 933 797,66	5 798 218,29

Tabel 16. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	0,00	339 667 661,27
PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	10 373 342,75
Pajak Daerah	0,00	2 238 704,07
Retribusi Daerah	0,00	6 063 116,50
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	2 071 522,18
DANA PERIMBANGAN	0,00	250 299 171,51
Bagi Hasil Pajak	0,00	8 655 517,33
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	9 627 027,17
Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	227 314 157,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	0,00	4 702 470,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	78 995 147,02
Pendapatan Hibah	0,00	10 000 000,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	32 457 255,02
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	36 537 892,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00

Tabel 17. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 660 482 745,73	1 839 004 647,11
PENDAPATAN ASLI DAERAH	360 698 350,13	394 646 889,45
Pajak Daerah	242 651 752,33	246 167 925,21
Retribusi Daerah	50 651 293,80	45 920 496,94
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8 237 246,37	13 206 503,30
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	59 158 057,63	89 351 963,99
DANA PERIMBANGAN	992 895 543,89	1 040 433 426,63
Bagi Hasil Pajak	45 783 277,46	54 643 065,13
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	17 267 575,43	21 121 790,50
Dana Alokasi Umum (DAU)	864 816 641,00	921 826 931,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	65 028 050,00	42 841 640,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	306 888 851,71	403 924 331,04
Pendapatan Hibah	6 581 753,88	41 796 053,52
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	53 548 302,83	85 684 220,52
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	221 758 795,00	250 170 293,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	25 000 000,00	0,00
Lainnya	0,00	26 273 764,00

Tabel 18. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Metro, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	604 188 390,42	705 744 010,78
PENDAPATAN ASLI DAERAH	59 224 528,01	97 307 834,64
Pajak Daerah	11 291 481,10	12 651 879,44
Retribusi Daerah	4 980 519,05	5 417 625,67
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2 884 797,83	3 389 937,35
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	40 067 730,03	75 848 392,17
DANA PERIMBANGAN	450 919 469,89	487 715 129,64
Bagi Hasil Pajak	22 968 640,09	18 206 944,80
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	17 072 882,80	20 805 783,84
Dana Alokasi Umum (DAU)	374 201 187,00	414 624 161,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	36 676 760,00	34 078 240,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	94 044 392,52	120 721 046,50
Pendapatan Hibah	0,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	23 420 367,31	36 285 142,85
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	69 290 881,00	77 989 976,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Lainnya	1 333 144,21	6 445 927,65

**Tabel 19. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
2013-2014**

(000 Rp)

Jenis Pendapatan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	13 190 491 129,72	15 177 932 485,86
PENDAPATAN ASLI DAERAH	882 782 710,75	1 174 862 546,34
Pajak Daerah	404 226 840,71	452 080 335,43
Retribusi Daerah	148 981 060,21	151 758 855,68
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	41 738 560,49	50 496 724,63
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	287 836 249,34	520 526 630,60
DANA PERIMBANGAN	10 335 839 850,18	11 243 462 592,67
Bagi Hasil Pajak	495 680 310,41	347 031 339,92
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	269 496 734,77	424 763 716,74
Dana Alokasi Umum (DAU)	8 632 680 610,00	9 517 884 446,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	937 982 195,00	953 783 090,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1 971 868 568,79	2 759 607 346,85
Pendapatan Hibah	35 768 056,88	58 296 053,52
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	342 367 945,85	723 095 777,55
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1 450 857 566,06	1 706 734 347,28
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	142 875 000,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	172 861 932,84	271 481 168,50

Tabel 20. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	847 853 084,20	627 029 312,03
Belanja Tidak Langsung	450 952 895,12	331 242 824,56
Belanja Pegawai	378 010 992,87	293 326 733,59
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	35 522 004,00	13 880 654,00
Belanja Bantuan Sosial	7 600 400,00	2 310 300,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	461 307,05	486 108,25
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	28 808 913,20	20 903 070,72
Belanja Tidak Terduga	549 278,00	335 958,00
Belanja Langsung	396 900 189,08	295 786 487,47
Belanja Pegawai	30 768 879,45	35 837 267,76
Belanja Barang dan Jasa	120 147 927,35	99 667 447,39
Belanja Modal	245 983 382,28	160 281 772,32

Tabel 21. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tanggamus, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	899 020 848,00	993 881 456,25
Belanja Tidak Langsung	492 666 081,00	551 837 952,97
Belanja Pegawai	452 227 070,00	502 580 079,72
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	250 000,00	250 000,00
Belanja Hibah	15 940 601,00	20 275 496,43
Belanja Bantuan Sosial	954 756,00	2 249 285,65
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	20 858 352,00	22 094 134,67
Belanja Tidak Terduga	2 435 302,00	4 388 956,50
Belanja Langsung	406 354 767,00	442 043 503,28
Belanja Pegawai	34 474 020,00	38 713 368,45
Belanja Barang dan Jasa	145 030 213,00	167 141 470,35
Belanja Modal	226 850 534,00	236 188 664,48

Tabel 22. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	1 140 463 713,93	1 263 321 080,30
Belanja Tidak Langsung	641 962 217,96	747 603 115,38
Belanja Pegawai	628 678 949,46	694 766 263,68
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	13 283 268,50	23 968 879,20
Belanja Bantuan Sosial	0,00	1 560 500,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	26 324 701,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	982 771,50
Belanja Langsung	498 501 495,97	515 717 964,92
Belanja Pegawai	54 422 405,81	65 836 782,05
Belanja Barang dan Jasa	218 946 030,77	243 823 952,47
Belanja Modal	225 133 059,39	206 057 230,41

Tabel 23. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	1 410 275 163,13	1 512 492 030,22
Belanja Tidak Langsung	888 518 493,50	938 748 771,23
Belanja Pegawai	777 912 583,95	798 684 384,01
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	250 000,00
Belanja Hibah	15 081 377,05	14 151 876,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	4 202 006,02
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	99 702,50	112 689,70
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	95 345 054,00	120 897 646,90
Belanja Tidak Terduga	79 776,00	450 168,60
Belanja Langsung	521 756 669,63	573 743 258,99
Belanja Pegawai	59 132 690,55	58 469 739,06
Belanja Barang dan Jasa	245 653 501,40	301 550 350,54
Belanja Modal	216 970 477,68	213 723 169,39

Tabel 24. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	1 612 488 000,00	1 724 090 117,47
Belanja Tidak Langsung	1 011 028 776,00	1 117 485 168,86
Belanja Pegawai	960 083 140,00	1 055 867 377,00
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	3 931 535,00	17 498 521,00
Belanja Bantuan Sosial	10 327 900,00	2 599 500,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	36 332 151,00	39 271 080,86
Belanja Tidak Terduga	354 050,00	2 248 690,00
Belanja Langsung	601 459 224,00	606 604 948,61
Belanja Pegawai	65 936 504,00	46 780 836,22
Belanja Barang dan Jasa	236 392 643,00	206 335 347,43
Belanja Modal	299 130 077,00	353 488 764,96

Tabel 25. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	1 109 303 360,95	1 163 202 313,49
Belanja Tidak Langsung	675 473 409,71	726 332 701,12
Belanja Pegawai	641 447 296,29	712 508 161,30
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	20 921 995,00	542 000,00
Belanja Bantuan Sosial	5 647 500,00	5 600 500,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	119 547,42	92 101,82
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6 992 493,00	6 992 488,00
Belanja Tidak Terduga	344 578,00	597 450,00
Belanja Langsung	433 829 951,24	436 869 612,37
Belanja Pegawai	50 522 255,23	65 414 437,75
Belanja Barang dan Jasa	143 051 876,06	157 367 625,23
Belanja Modal	240 255 819,95	214 087 549,39

Tabel 26. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Way Kanan, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	757 542 651,31	845 628 401,73
Belanja Tidak Langsung	396 951 459,08	436 086 120,05
Belanja Pegawai	363 199 973,33	393 417 642,91
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	7 850 450,00	11 977 460,00
Belanja Bantuan Sosial	3 938 500,00	4 919 500,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	21 536 109,75	25 743 945,14
Belanja Tidak Terduga	426 426,00	27 572,00
Belanja Langsung	360 591 192,23	409 542 281,68
Belanja Pegawai	28 133 053,00	28 528 346,70
Belanja Barang dan Jasa	130 824 143,03	148 746 461,24
Belanja Modal	201 633 996,20	232 267 473,74

Tabel 27. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	696 002 596,62	776 125 961,71
Belanja Tidak Langsung	344 484 568,05	359 644 712,19
Belanja Pegawai	287 316 689,56	310 761 239,21
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	342 470,74	670 812,22
Belanja Hibah	7 635 390,00	10 042 500,00
Belanja Bantuan Sosial	1 320 000,00	227 500,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	47 546 629,25	37 463 360,77
Belanja Tidak Terduga	323 388,50	479 300,00
Belanja Langsung	351 518 028,57	416 481 249,53
Belanja Pegawai	45 121 705,87	55 977 285,00
Belanja Barang dan Jasa	161 882 155,70	186 645 481,53
Belanja Modal	144 514 167,00	173 858 483,00

Tabel 28. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	822 745 409,18	930 780 038,47
Belanja Tidak Langsung	392 528 559,40	454 323 514,26
Belanja Pegawai	366 021 993,00	420 102 540,49
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	7 277 200,00	7 960 456,67
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	19 229 366,40	26 260 517,10
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00
Belanja Langsung	430 216 849,78	476 456 524,21
Belanja Pegawai	45 549 770,25	58 308 291,00
Belanja Barang dan Jasa	144 439 049,35	155 633 706,52
Belanja Modal	240 228 030,18	262 514 526,69

Tabel 29. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	772 327 158,00	840 212 481,49
Belanja Tidak Langsung	455 433 128,00	540 779 248,05
Belanja Pegawai	436 256 505,00	504 222 828,10
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	9 660 250,00	23 060 220,00
Belanja Bantuan Sosial	759 250,00	4 901 500,86
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	8 545 123,00	8 569 199,09
Belanja Tidak Terduga	212 000,00	25 500,00
Belanja Langsung	316 894 030,00	299 433 233,44
Belanja Pegawai	32 016 240,00	32 855 073,53
Belanja Barang dan Jasa	119 087 082,00	136 927 718,37
Belanja Modal	165 790 708,00	129 650 441,55

Tabel 30. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Mesuji, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	451 836 408,81	517 734 653,43
Belanja Tidak Langsung	166 967 591,81	187 863 955,03
Belanja Pegawai	133 508 517,00	148 861 853,85
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	3 740 000,00	5 106 800,00
Belanja Bantuan Sosial	16 507 290,69	14 565 000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	12 483 354,12	17 657 088,62
Belanja Tidak Terduga	728 430,00	1 673 212,55
Belanja Langsung	284 868 817,00	329 870 698,40
Belanja Pegawai	36 838 609,00	33 464 738,90
Belanja Barang dan Jasa	97 370 695,00	139 016 144,32
Belanja Modal	150 659 513,00	157 389 815,18

**Tabel 31. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
2013-2014**

	(000 Rp)	
Jenis Belanja	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	565 054 667,23	576 692 368,01
Belanja Tidak Langsung	233 145 191,43	247 863 243,22
Belanja Pegawai	214 019 545,64	227 554 025,18
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	6 261 125,00	4 275 948,25
Belanja Bantuan Sosial	250 000,00	433 020,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	12 614 520,79	15 600 249,79
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00
Belanja Langsung	331 909 475,80	328 829 124,80
Belanja Pegawai	37 089 268,55	33 714 257,00
Belanja Barang dan Jasa	111 209 491,52	129 562 913,19
Belanja Modal	183 610 715,73	165 551 954,61

Tabel 32. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	0,00	276 015 491,78
Belanja Tidak Langsung	0,00	153 576 165,02
Belanja Pegawai	0,00	134 944 538,57
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	2 545 000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	220 723,95
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	15 852 637,50
Belanja Tidak Terduga	0,00	13 265,00
Belanja Langsung	0,00	122 439 326,76
Belanja Pegawai	0,00	7 244 517,90
Belanja Barang dan Jasa	0,00	40 208 943,58
Belanja Modal	0,00	74 985 865,28

Tabel 33. Realisasi Belanja Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	1 780 300 660,34	1 799 475 905,42
Belanja Tidak Langsung	939 950 189,46	944 850 740,18
Belanja Pegawai	872 300 872,18	903 931 706,44
Belanja Bunga	4 262 522,51	6 392 664,54
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	30 830 590,00	23 348 257,50
Belanja Bantuan Sosial	14 881 503,93	9 312 387,71
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	734 132,00	732 724,00
Belanja Tidak Terduga	16 940 568,84	1 133 000,00
Belanja Langsung	840 350 470,88	854 625 165,23
Belanja Pegawai	89 291 806,75	132 123 226,93
Belanja Barang dan Jasa	351 609 822,03	368 311 410,15
Belanja Modal	399 448 842,10	354 190 528,15

Tabel 34. Realisasi Belanja Pemerintah Kota Metro, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	609 265 220,46	693 309 716,71
Belanja Tidak Langsung	326 819 012,13	354 808 007,56
Belanja Pegawai	309 198 254,85	335 111 942,15
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	17 009 026,50	18 504 985,72
Belanja Bantuan Sosial	70 000,00	5 000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	473 064,42	1 117 413,32
Belanja Tidak Terduga	68 666,36	68 666,36
Belanja Langsung	282 446 208,33	338 501 709,15
Belanja Pegawai	35 527 540,81	26 195 306,32
Belanja Barang dan Jasa	142 473 794,58	184 607 655,60
Belanja Modal	104 444 872,94	127 698 747,23

**Tabel 35. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung
2013-2014**

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	13 474 478 942,16	14 539 991 328,51
Belanja Tidak Langsung	7 416 881 572,65	8 093 046 239,68
Belanja Pegawai	6 820 182 383,13	7 436 641 316,21
Belanja Bunga	4 262 522,51	6 392 664,54
Belanja Subsidi	592 470,74	1 170 812,22
Belanja Hibah	194 944 812,05	194 594 054,76
Belanja Bantuan Sosial	62 257 100,62	55 431 000,24
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	680 556,97	911 623,72
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	311 499 262,93	385 480 257,48
Belanja Tidak Terduga	22 462 463,70	12 424 510,51
Belanja Langsung	6 057 597 369,51	6 446 945 088,83
Belanja Pegawai	644 824 749,27	719 463 474,57
Belanja Barang dan Jasa	2 368 118 424,79	2 665 546 627,90
Belanja Modal	3 044 654 195,45	3 061 934 986,36

Tabel 36. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	83 831 419,00	66 315 006,00
Penerimaan Pembiayaan Daerah	84 500 784,00	66 870 224,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	84 500 784,00	66 870 224,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	669 365,00	555 218,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	500 000,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	169 365,00	555 218,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	63 758 238,00	42 447 400,11

Tabel 37. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	23 767 187,00	(22 576 537,28)
Penerimaan Pembiayaan Daerah	39 430 830,00	8 566 626,31
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	39 430 830,00	8 566 626,31
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	15 663 643,00	31 143 163,59
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	900 000,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	14 763 643,00	31 143 163,59
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	8 566 628,00	7 467 105,57

**Tabel 38. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
2013-2014**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	109 591 125,97	101 959 501,46
Penerimaan Pembiayaan Daerah	117 139 628,00	117 141 988,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	117 139 628,00	117 139 628,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	2 360,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7 548 502,03	15 182 486,54
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	7 548 502,03	15 182 486,54
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	117 139 628,01	187 228 419,07

Tabel 39. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	105 073 557,19	60 529 369,17
Penerimaan Pembiayaan Daerah	108 073 557,19	61 637 579,32
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	108 073 557,19	61 637 579,32
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3 000 000,00	1 108 210,15
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1 000 000,00	1 000 000,00
Pembayaran Pokok Utang	2 000 000,00	108 210,15
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	61 582 123,63	98 609 893,19

**Tabel 40. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
2013-2014**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	97 916 800,00	76 294 461,61
Penerimaan Pembiayaan Daerah	117 500 087,00	99 460 383,95
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	117 500 087,00	99 382 583,95
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	77 800,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	19 583 287,00	23 165 922,33
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	1 000 000,00
Pembayaran Pokok Utang	19 583 287,00	22 165 922,33
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	99 382 583,00	142 437 972,18

Tabel 41. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	35 870 392,98	35 994 373,58
Penerimaan Pembiayaan Daerah	40 070 392,98	40 249 925,49
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	40 070 392,98	41 034 090,14
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	(784 164,65)
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4 200 000,00	4 255 551,91
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3 000 000,00	3 500 000,00
Pembayaran Pokok Utang	1 200 000,00	755 551,91
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	41 034 090,14	165 223 737,61

Tabel 42. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	57 466 512,17	70 205 662,51
Penerimaan Pembiayaan Daerah	62 093 260,79	78 331 022,48
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	62 093 260,79	78 305 192,48
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	25 830,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4 626 748,62	8 125 359,98
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1 750 000,00	1 250 000,00
Pembayaran Pokok Utang	2 876 748,62	6 875 359,98
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	78 305 192,48	95 871 977,14

Tabel 43. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	26 437 986,49	2 925 274,05
Penerimaan Pembiayaan Daerah	40 981 094,86	18 787 957,03
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	22 646 249,35	18 787 957,03
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	18 334 845,51	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	14 543 108,37	15 862 682,98
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	375 000,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	15 862 682,98
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	14 168 108,37	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	18 518 345,64	806 946 100,61

Tabel 44. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	(12 643 467,98)	77 434 500,80
Penerimaan Pembiayaan Daerah	0,00	90 243 865,01
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	90 243 865,01
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	12 643 467,98	12 809 364,21
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	12 809 364,21
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	12 643 467,98	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	(52 744 278,89)	60 229 842,86

Tabel 45. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	26 578 525,00	(6 988 550,00)
Penerimaan Pembiayaan Daerah	33 909 490,00	6 267 863,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	33 909 490,00	38 556 047,26
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7 330 965,00	13 256 413,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	392 175,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	6 938 790,00	8 032 388,96
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	38 767 594,00	72 223 652,92

Tabel 46. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Mesuji, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	42 941 050,00	31 232 722,30
Penerimaan Pembiayaan Daerah	51 773 639,00	32 079 630,50
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	51 773 639,00	32 079 630,50
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	8 832 589,00	846 908,20
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	8 832 589,00	846 908,20
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	68 558 290,00	71 794 707,50

**Tabel 47. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
2013-2014**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	3 691 321,54	7 021 923,78
Penerimaan Pembiayaan Daerah	23 855 294,68	7 021 923,78
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	23 855 294,68	7 021 923,78
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
		0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	20 163 973,14	0,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9 500 000,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	10 663 973,14	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	7 021 923,78	613 996 758,65

Tabel 48. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	0,00	508 331 544,52
Penerimaan Pembiayaan Daerah	0,00	508 331 544,52
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	508 331 544,52
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0,00	339 899 977,32

Tabel 49. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	127 402 141,30	51 459 709 536,57
Penerimaan Pembiayaan Daerah	142 291 136,77	51 511 184 766,77
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	90 097 476,66	35 954 566,77
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	52 193 660,11	51 475 230 200,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	14 888 995,47	51 475 230,20
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	17 992 740,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8 500 000,00	33 482 490,20
Pembayaran Pokok Utang	6 388 995,47	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	35 954 566,77	1 821 684 507,78

Tabel 50. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kota Metro, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	62 483 985,03	36 104 037,45
Penerimaan Pembiayaan Daerah	64 431 855,70	39 197 414,36
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	64 361 826,81	71 532 816,86
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	70 028,89	14 174,33
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1 947 870,67	3 093 376,91
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1 000 000,00	1 000 000,00
Pembayaran Pokok Utang	947 870,67	100 000,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya.....	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	57 714 800,03	82 881 285,26

**Tabel 51. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
2013-2014**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	738 048 979,35	52 569 296 483,84
Penerimaan Pembiayaan Daerah	873 857 390,86	52 750 010 475,62
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	855 452 516,46	1 275 444 275,93
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	70 028,89	120 164,33
Penerimaan Piutang Daerah	18 334 845,51	0,00
Lainnya	52 193 660,11	51 474 446 035,35
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	135 808 411,51	180 713 991,77
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	17 992 740,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	26 917 175,00	41 232 490,20
Pembayaran Pokok Utang	81 913 763,93	114 437 256,85
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	26 811 576,35	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	133 036 622,56	4 156 069 238,69

DAFTAR PUSTAKA

Andaiyani. 2013. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Operasional Terhadap Jumlah Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 1(1).

BPS Provinsi Lampung. 2015. Statistik Daerah Provinsi Lampung 2015.

BPS Provinsi Lampung. 2015. PDRB Menurut Pengeluaran (Tahun Dasar 2010) Provinsi Lampung 2010-2014.

Pemerintah Provinsi Lampung. 2015. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 (*Audited*).

<http://lampung.bps.go.id>

Data

Mencerdaskan Bangsa



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI LAMPUNG

Jl. Basuki Rahmat No. 54 Bandar Lampung, 35215

Telp. (0721) 482909 Fax. (0721) 484329

Email: bps1800@bps.go.id, Website: <http://lampung.bps.go.id>



STATISTIK KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG 2014

ISSN : 0126 – 4699
No. Publikasi : 18542.1504
Katalog BPS : 7203005.18
Ukuran Buku : 21 cm x 28 cm
Jumlah Halaman : viii + 76 halaman

Naskah:
Bidang Statistik Distribusi
BPS Provinsi Lampung

Gambar Kulit:
Bidang Statistik Distribusi
BPS Provinsi Lampung

Diterbitkan Oleh:
BPS Provinsi Lampung

Boleh mengutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014, merupakan seri publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Publikasi ini memuat gambaran umum tentang sumber-sumber penerimaan maupun pos belanja Pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah kabupaten/kota. Data yang ditampilkan dalam publikasi ini adalah data realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2013 dan tahun 2014 Pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota.

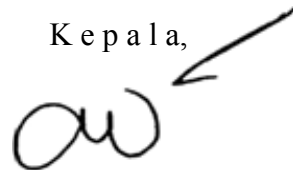
Sumber data statistik keuangan ini diperoleh dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Data tersebut dikumpulkan berdasarkan hasil survei keuangan daerah yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung dan Badan Pusat Statistik kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Semoga publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan konsumen data, khususnya data mengenai keuangan daerah.

Kritik dan saran guna perbaikan dan kesempurnaan publikasi ini dimasa mendatang masih kami harapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan publikasi ini, kami ucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, November 2015

BPS PROVINSI LAMPUNG

K e p a l a,



Ir. Adhi Wiriana, M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I. PENJELASAN UMUM	1
1.1. Pendahuluan	1
1.2. Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data	2
BAB II. KONSEP DAN DEFINISI.....	4
BAB III. ULASAN RINGKAS	11
3.1. Keuangan Daerah Provinsi Lampung	11
3.1.1. Pendapatan Pemerintah Provinsi Lampung.....	15
3.1.2. Belanja Pemerintah Provinsi Lampung.....	16
3.2. Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.....	19
3.2.1. Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.....	20
3.2.2. Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.....	21
3.3. Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.....	22
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Lampung, 2013 dan APBD Pemerintah Provinsi Lampung, 2014 (Juta Rupiah)	14
Tabel 3.2. Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Lampung 2014 (Juta Rupiah).....	15
Tabel 3.3. Distribusi Persentase Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Lampung Menurut Jenis Belanja, 2013-2014 (Juta Rupiah).....	18
Tabel 3.4. Perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, 2013-2014 (Juta Rupiah)	20
Tabel 3.5. Distribusi Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung menurut Jenis Belanja, 2013-2014	22
Tabel 1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Lampung, 2013-2014	25
Tabel 2. Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Lampung, 2013-2014.....	26
Tabel 3. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Provinsi Lampung, 2013-2014	27
Tabel 4. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, 2013-2014....	28
Tabel 5. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, 2013-2014	29
Tabel 6. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, 2013-2014	30
Tabel 7. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, 2013-2014 ..	31
Tabel 8. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, 2013-2014 ..	32
Tabel 9. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2013-2014	33
Tabel 10. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, 2013-2014.....	34
Tabel 11. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, 2013-2014 ...	35
Tabel 12. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2013-2014.....	36
Tabel 13. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2013-2014.....	37
Tabel 14. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mesuji, 2013-2014.....	38

Tabel 15. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2013-2014	39
Tabel 16. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2013-2014	40
Tabel 17. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2013-2014	41
Tabel 18. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Metro, 2013-2014	42
Tabel 19. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, 2013- 2014.....	43
Tabel 20. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, 2013-2014.....	44
Tabel 21. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tanggamus, 2013-2014	45
Tabel 22. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, 2013-2014.....	46
Tabel 23. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, 2013-2014.....	47
Tabel 24. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, 2013-2014.....	48
Tabel 25. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2013-2014.....	49
Tabel 26. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Way Kanan, 2013-2014	50
Tabel 27. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, 2013-2014	51
Tabel 28. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2013-2014.....	52
Tabel 29. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2013-2014	53
Tabel 30. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Mesuji, 2013-2014.....	54
Tabel 31. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2013-2014..	55
Tabel 32. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2013-2014.....	56
Tabel 33. Realisasi Belanja Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2013-2014.....	57
Tabel 34. Realisasi Belanja Pemerintah Kota Metro, 2013-2014.....	58
Tabel 35. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, 2013-2014.....	59
Tabel 36. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, 2013-2014.....	60
Tabel 37. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, 2013-2014.....	61

Tabel 38. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, 2013-2014	.62
Tabel 39. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, 2013-2014	..63
Tabel 40. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, 2013 – 201464
Tabel 41. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2013-2014	...65
Tabel 42. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, 2013-201466
Tabel 43. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, 2013-2014	...67
Tabel 44. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2013-201468
Tabel 45. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2013-201469
Tabel 46. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Mesuji, 2013-201470
Tabel 47. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2013-201471
Tabel 48. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2013-201472
Tabel 49. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2013-201473
Tabel 50. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kota Metro, 2013-201474
Tabel 51. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, 2013-201475

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Persentase Sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung, 2014	16
Gambar 3.2. Persentase Realisasi Belanja Daerah Provinsi Lampung, 2014.....	18
Gambar 3.3. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, 2014.....	21

<http://lampung.bps.go.id>
<http://lampung.bps.go.id>

BAB I. PENJELASAN UMUM

1.1. Pendahuluan

Arah kebijakan keuangan daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta potensi daerah yang berpedoman pada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014, maka pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah tersebut dalam mengalokasikan APBD didasarkan pada program-program pembangunan yang disusun dengan perspektif kedepan sesuai dengan prosedur dan mekanisme mulai dari perencanaan di tingkat desa/kelurahan, kabupaten/kota, hingga provinsi.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan perlu ditingkatkan kemampuan mengelola dan kemampuan membangun daerah. Diantara kemampuan mengelola adalah mengelola APBD yang merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja, sehingga anggaran daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses perencanaan pembangunan daerah. Anggaran juga merupakan cermin finansial ekonomi masyarakat serta pilihan masyarakat. Selain itu anggaran belanja lebih diprioritaskan pada program dan kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat dan menjawab kebutuhan masyarakat serta pembangunan daerah. Alokasi belanja daerah diprioritaskan untuk percepatan implementasi program-program unggulan daerah seperti Infrastruktur Penghubung Jawa Sumatera (IPJS), Jalan Tol Terbanggi Bakauheni, dan lain-lain. Dalam pengelolaannya berpedoman kepada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis serta memperhatikan kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Publikasi statistik keuangan daerah Provinsi Lampung secara umum menyajikan data tentang pendapatan dan belanja pemerintah daerah Provinsi Lampung dan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung selama dua periode tahun anggaran.

Beberapa informasi penting yang dapat diperoleh dari statistik keuangan daerah Provinsi Lampung ini antara lain:

- a. Memberikan gambaran tentang realisasi APBD provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Untuk mengetahui potensi dan peranan sumber dana dari masing-masing daerah.
- c. Memberikan informasi bagi pemerintah pusat dalam menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan untuk masing-masing daerah.
- d. Sebagai salah satu indikator bagi swasta ataupun masyarakat untuk menanamkan investasi sesuai dengan potensi yang ada di daerah yang bersangkutan.

1.2. Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data

Data statistik keuangan daerah Provinsi Lampung diperoleh dari pemerintah daerah Provinsi Lampung dan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Data tersebut dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung dan Badan Pusat Statistik kabupaten/kota se-Provinsi Lampung secara sensus dengan menggunakan daftar K-1 dan K-2.

1.2.1. Statistik keuangan daerah tingkat provinsi

Pencacahan statistik keuangan daerah Provinsi Lampung dilakukan setiap tahun dengan menggunakan daftar K-1. Sumber data diperoleh dari Biro Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

- 1.2.2. Pencacahan keuangan daerah kabupaten/kota dilakukan secara lengkap di seluruh daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung dengan menggunakan daftar K-2. Sumber data diperoleh dari bagian keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di masing-masing kabupaten/kota.

1.2.3. Jenis daftar isian yang digunakan

Daftar K-1

Daftar ini digunakan untuk mencatat data statistik yang menyangkut realisasi keuangan daerah provinsi.

Daftar K-2

Daftar K-2 adalah jenis daftar yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang realisasi keuangan daerah kabupaten/kota.

<http://lampung.bps.go.id>

BAB II. KONSEP DAN DEFINISI

Realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota adalah realisasi pendapatan dan belanja daerah Provinsi Lampung pada tiap tahun anggaran.

Pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Dana perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan yang sah

PAD, adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya yang bersumber dari potensi daerah sendiri. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- **Pajak daerah**, adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaannya dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Pendapatan pajak daerah ditetapkan sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 yang pelaksanaannya diatur dengan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain : pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain.
- **Retribusi daerah**, yaitu pungutan daerah yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah secara langsung dan nyata kepada pengguna jasa atau fasilitas.

Retribusi daerah antara lain adalah pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, penggantian biaya cetak peta, pengujian kapal perikanan, pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan/atau pertokoan, penjualan produksi daerah, izin peruntukkan penggunaan tanah, izin trayek, dan lain-lain.

- **Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan**, adalah penerimaan hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya, dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.
- **Lain-lain PAD yang sah**, merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik kedalam pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai sifat pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut yang bertujuan untuk menunjang, melapangkan, dan/atau memantapkan suatu kebijakan daerah di bidang tertentu yang meliputi pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan, tuntutan ganti rugi, penerimaan lain-lain, hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, dan pendapatan denda pajak.

Dana Perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

- **Bagi Hasil Pajak:**

Bagi hasil pajak terdiri dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dan PPh pasal 21 orang pribadi, dan lain-lain.

- **Bagi Hasil Bukan Pajak :**

Bagi hasil bukan pajak terdiri dari Iuran Hak Penguasaan Hutan (IHPH), pemberian hak atas tanah negara, iuran tetap (*landrent*), iuran eksplorasi/eksploitasi/royalti, bagi hasil dari cukai tembakau, hasil pertambangan minyak bumi/gas alam, dan lain-lain.

- **DAU**

DAU adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

- **DAK**

DAK adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dana penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan yang sudah digariskan.

- **Lain-lain pendapatan yang sah**, adalah penerimaan lainnya dari pemerintah pusat dan/atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari bantuan dana kontijensi/penyeimbangan/penyesuaian dari pemerintah, dan dana darurat yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis *solvability*.

Kebijakan umum belanja daerah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Berpedoman pada prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan kota.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja penyelenggaraan urusan pilihan diprioritaskan pada kegiatan sektoral yang terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ditegaskan bahwa belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi *equitas* dana lancar dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Sesuai Permendagri tersebut telah ditentukan bahwa struktur belanja daerah terdiri dari ***belanja tidak langsung*** dan ***belanja langsung***.

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sulit diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Adapun yang termasuk dalam belanja tidak langsung adalah belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

- ***Belanja pegawai*** merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam belanja pegawai termasuk juga uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota

DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- **Belanja bunga** digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- **Belanja subsidi** digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Perusahaan/lembaga tertentu adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
- **Belanja hibah** digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- **Belanja bantuan sosial** digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif, dan memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya.
- **Belanja bagi hasil** digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- **Belanja bantuan keuangan** digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota

kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

- ***Belanja tidak terduga*** merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat di daerah.

Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Kelompok belanja langsung ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja yang bersifat strategis, dengan nilai yang besar, dapat dilaksanakan dengan menetapkan belanja *multi years* dan/atau *turn key* yang pengalokasian dananya disepakati oleh DPRD.

- ***Belanja pegawai*** dalam hal ini untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- ***Belanja barang dan jasa*** digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari duabelas bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.
- ***Belanja modal*** digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai

nilai manfaat lebih dari duabelas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan jasa.

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan daerah baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dengan maksud menutup defisit atas memanfaatkan surplus anggaran.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

BAB III. ULASAN RINGKAS

Sebagai instrumen kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalam pembangunan daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besaran pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran dimasa-masa yang akan datang, sumber pengembangan, ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

APBD pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dapat dipakai juga sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah, serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang transparan, berorientasi pada kepentingan, dan akuntabilitas publik. Dengan demikian APBD harus dirancang untuk mengarahkan alokasi dana yang membiayai berbagai program dan kegiatan sehingga dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan kepuasan publik (*public satisfaction*) sebagai wujud pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik, sehingga pembangunan daerah yang efektif dan efisien dapat dicapai.

Sejak tahun 2002, kebijakan keuangan daerah yang tercermin dalam APBD didasarkan kepada pendekatan kinerja, yaitu suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan. Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Dengan diterapkannya sistem anggaran tersebut, maka format APBD juga mengalami perubahan terutama di sisi belanja daerah.

3.1. Keuangan Daerah Provinsi Lampung

Dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Provinsi Lampung tahun 2014, pemerintah daerah telah mencapai kemajuan walaupun masih banyak kendala dan

tantangan yang dihadapi. Kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan APBD merupakan gambaran langkah konkret pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dan situasi perekonomian yang cenderung belum stabil. Hal tersebut terlihat pada laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang mengalami perlambatan sebesar 5,08 persen (yoy) lebih rendah dibandingkan tahun 2013 yang tumbuh 5,78 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan nasional yang tumbuh 5,02 persen (yoy). Beberapa penyebab perlambatan adalah perlambatan pertumbuhan ekspor dan perlambatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. (BPS Provinsi Lampung, 2015).

Untuk itu otonomi daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah mengatur keuangan daerahnya harus dimanfaatkan dalam konteks memberikan pelayanan yang lebih, bukan dengan pembebanan pajak yang semakin meningkat yang bisa memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.

Berbagai cara dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dalam upaya pemenuhan pembiayaan pelayanan publiknya. *Pertama*, pemerintah daerah memperoleh dana dari sumber-sumber yang dikategorikan PAD. *Kedua*, memperoleh transfer dana dari APBN yang dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU, dan DAK. Pengalokasian dana perimbangan ini selain ditujukan untuk memberikan kepastian sumber pendapatan bagi APBD, juga bertujuan untuk mengurangi/memperkecil perbedaan kapasitas fiskal antar daerah. *Ketiga*, daerah memperoleh penerimaan dari sumber lainnya seperti bantuan dana kontingensi dan bantuan dana darurat. *Keempat*, menerima pinjaman dari dalam dan luar negeri.

Sesuai dengan arah kebijakan PAD pemerintah Provinsi Lampung, menetapkan hal sebagai berikut :

- Dalam menetapkan PAD mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun sebelumnya, perkiraan ekonomi tahun 2014 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan terkait peraturan perundang-undangan.
- Pemerintah memberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi pelaku ekonomi dan tidak membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan

retribusi daerah, rasionalisasi pajak daerah dan retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD.

- Dalam hal jenis pajak daerah dan retribusi daerah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

(Pemerintah Provinsi Lampung, 2015).

Dalam merumuskan target anggaran pendapatan pemerintah Provinsi Lampung, cenderung menentukan target minimal dari sumber PAD. Dengan adanya kenaikan penerimaan dana perimbangan, maka pendapatan daerah pemerintah Provinsi Lampung tahun 2014 yang ditargetkan sebesar 4,57 trilyun rupiah, lebih tinggi dari penerimaan yang diperoleh pada tahun 2013 yaitu 3,93 trilyun rupiah atau naik 16,59 persen. Karena masih berupa rancangan, maka belum tentu sama dengan realisasinya, bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Jika perkiraan penerimaan lebih besar dari realisasinya, menyebabkan ada kegiatan yang telah direncanakan diawal tahun tidak dapat diselesaikan atau mungkin tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedianya anggaran. Hal ini menjadikan kinerja keuangan daerah menjadi kurang baik.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sejak tahun 2001 transfer dana dari APBN ke daerah dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan dari pemerintah pusat tahun 2014 dianggarkan mencapai 1,53 trilyun rupiah mengalami kenaikan 10,81 persen dari tahun 2013 yaitu sebesar 1,38 trilyun rupiah. Dana perimbangan cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan struktur belanja pemerintah daerah, belanja tidak langsung dianggarkan mencapai 2,24 trilyun rupiah mengalami kenaikan 23,62 persen dari tahun 2013 yaitu sebesar 1,81 trilyun rupiah. Sementara itu, belanja langsung tahun 2014 dianggarkan oleh pemerintah pusat mencapai 2,37 trilyun rupiah yang naik 14,65 persen dari tahun 2013 yaitu sebesar 2,07 trilyun rupiah. (Tabel 3.1).

Tabel 3.1. Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Lampung, 2013 dan APBD Pemerintah Provinsi Lampung, 2014 (Juta Rupiah)

Rincian	Realisasi 2013	Anggaran 2014	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
PENERIMAAN DAERAH	3 925 661,24	4 576 791,05	16,59
Pendapatan Daerah	3 901 950,62	4 576 791,05	17,29
Pendapatan Asli Daerah	1 771 297,94	2 258 133,10	27,48
Dana Perimbangan	1 384 043,54	1 533 653,38	10,81
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	746 609,14	785 004,56	5,14
Penerimaan Pembiayaan	23 710,62	0,00	100,00
PENGELUARAN DAERAH	3 884 534,95	4 617 907,56	18,88
Belanja Tidak Langsung	1 811 879,22	2 239 758,36	23,62
Belanja Langsung	2 072 655,73	2 376 219,20	14,65
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	1 930,00	100,00

Perubahan dalam perencanaan anggaran suatu pemerintahan tidak selalu berdampak negatif. Hal tersebut dapat menyesuaikan situasi perekonomian, dan kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah. Selain itu, optimalisasi dalam memanfaatkan dan mengelola sumber-sumber penerimaan dapat mencapai target penerimaan yang telah dianggarkan. Hal ini juga terlihat pada rancangan APBD Provinsi Lampung Tahun 2014. Dari rencana penerimaan sebesar 4,57 trilyun rupiah, dalam realisasinya diperoleh 4,56 trilyun rupiah atau mengalami penurunan 0,20 persen. Penurunan yang terjadi disebabkan oleh beberapa komponen pendukung pendapatan daerah yang turun seperti dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah masing-masing turun 3,99 persen dan 0,72 persen. Sedangkan PAD tidak mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebesar 0,73 persen. (Tabel 3.2).

Dari sisi pengeluaran, realisasi pengeluaran daerah lebih rendah dari yang dianggarkan tahun 2014. Hal tersebut terlihat pada perubahan komponen pendukungnya seperti belanja langsung dan belanja tidak langsung yang juga mengalami penurunan. Realisasi belanja tidak langsung turun 4,25 persen menjadi 2,14 trilyun rupiah dari 2,24 trilyun rupiah yang dianggarkan. Sementara itu realisasi belanja langsung juga mengalami penurunan sebesar 2,80 persen dari rencana anggaran 2,37 trilyun rupiah menjadi 2,31 trilyun rupiah.

**Tabel 3.2. Anggaran dan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Lampung
2014 (Juta Rupiah)**

Rincian	Anggaran	Realisasi	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
PENERIMAAN DAERAH	4 576 791,05	4 567 673,50	(0,20)
Pendapatan Daerah	4 576 791,05	4 526 532,29	(1,10)
Pendapatan Asli Daerah	2 258 133,10	2 274 685,57	0,73
Dana Perimbangan	1 533 653,38	1 472 486,57	(3,99)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	785 004,56	779 360,15	(0,72)
Penerimaan Pembiayaan	0,00	41 141,21	100,00
PENGELUARAN DAERAH	4 617 907,56	4 456 117,31	(3,50)
Belanja Tidak Langsung	2 239 758,36	2 144 560,81	(4,25)
Belanja Langsung	2 376 219,20	2 309 626,50	(2,80)
Pengeluaran Pembiayaan	1 930,00	1 930,00	0,00

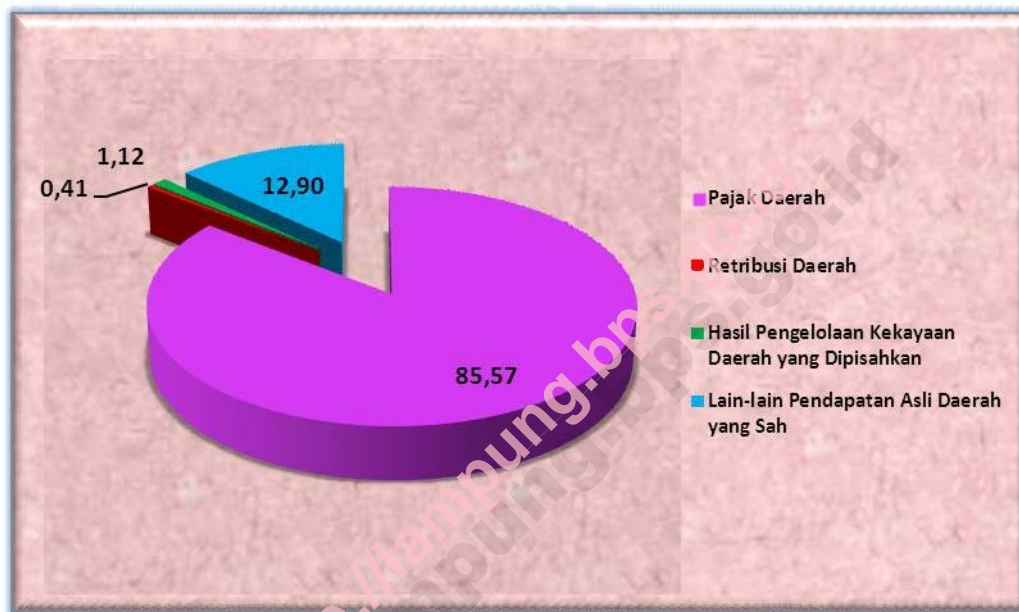
3.1.1. Pendapatan Pemerintah Provinsi Lampung

Dari ketiga sumber pendapatan daerah, PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi daerah karena pendapatan ini bersumber dari potensi daerah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, daerah mempunyai kewenangan penuh untuk memanfaatkan PAD sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Penerimaan PAD Provinsi Lampung tahun 2014 lebih besar 22,13 persen dari 1,77 trilyun rupiah tahun 2013 menjadi 2,27 trilyun rupiah. Tahun 2014, persentase sumber pendapatan dari PAD lebih tinggi dibandingkan dengan dana perimbangan yaitu 50,25 persen. (Diolah dari Tabel 3.1 Kolom 2 dan Tabel 3.2 Kolom 3).

Untuk mengukur dan menilai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan wilayahnya dapat dibandingkan antara realisasi penerimaan PAD dan total realisasi pendapatan yang dapat didefinisikan dengan rasio. Makin besar rasio yang dihasilkan maka pemerintah daerah makin mandiri dalam membiayai pembangunan di wilayahnya. Makin kecil angka rasio berarti makin besar tingkat ketergantungan

pemerintah daerah kepada pemerintah pusat/pihak lain. Ditinjau dari rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, Provinsi Lampung pada tahun 2014 sumbangan PAD terhadap total pendapatan dalam menyediakan dana pembangunan masih lebih besar dibandingkan tahun 2013 dengan nilai rasio sebesar 50,25 persen yang menunjukkan tingkat kemandirian Provinsi Lampung semakin baik. (Diolah dari Tabel 3.2 Kolom 3).

Gambar 3.1. Persentase Sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung 2014



Dari Gambar 3.1 tampak bahwa sumber pendapatan asli daerah Provinsi Lampung dari penerimaan pajak daerah tahun 2014 merupakan sumber yang paling dominan yaitu 85,57 persen. Retribusi yang merupakan bentuk penerimaan atas penggunaan fasilitas/pelayanan yang diberikan pemerintah Provinsi Lampung kepada masyarakat, hanya memberikan sumbangan terhadap PAD sebesar 0,41 persen. Rendahnya sumbangan retribusi daerah terhadap anggaran pendapatan daerah bisa terjadi karena pada saat perencanaan pemerintah kurang memiliki informasi sektor mana yang diperkirakan masyarakat akan banyak menggunakan fasilitas/pelayanan pemerintah.

3.1.2. Belanja Pemerintah Provinsi Lampung

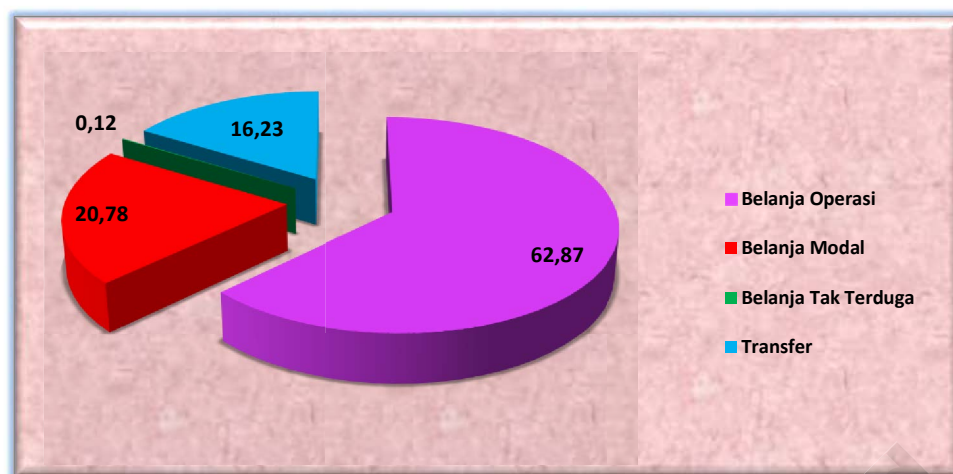
Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi *equitas* dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa. Dilihat dari proporsinya terhadap realisasi belanja daerah tahun 2014, belanja operasi mendominasi pengeluaran pemerintah Provinsi Lampung sebesar 62,87 persen. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor komponen pendukung belanja operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja hibah yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya masing-masing sebesar 9,23 persen; 9,15 persen; dan 11,35 persen. Sedangkan komponen pendukung lainnya mengalami penurunan seperti belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan masing-masing turun sebesar 17,01 persen dan 88,15 persen. (Gambar 3.2 dan Diolah dari Tabel 2 lampiran).

Seperti halnya pemanfaatan anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan baik itu rutin maupun fisik. Hal ini terlihat dari rasio belanja operasi terhadap total belanja dengan membandingkan total realisasi belanja operasi dengan total belanja keseluruhan. Rasio belanja operasi pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014 sebesar 62,88 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan rutin dibandingkan untuk kegiatan pembangunan fisik. (Diolah dari Tabel 2 lampiran).

Dalam mengukur pembangunan infrastruktur, pemerintah Provinsi Lampung masih perlu melakukan perbaikan dan menjadi perhatian. Terlihat dari rasio modal terhadap total belanja yaitu sebesar 20,78 persen. Hal tersebut menunjukkan persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik infrastruktur masih perlu ditingkatkan. (Diolah dari Tabel 2 lampiran).

Gambar 3.2. Persentase Realisasi Belanja Daerah Provinsi Lampung, 2014



Dilihat dari kontribusinya, dibandingkan dengan tahun 2013 belanja tidak langsung tahun 2014 mengalami kenaikan. Jika tahun 2013 kontribusinya dalam belanja daerah yaitu 46,64 persen, maka tahun 2014 kontribusi belanja tidak langsung yaitu 48,15 persen (Tabel 3.3). Dengan naiknya *share* belanja tidak langsung tahun 2014, hal ini berarti pemerintah cenderung kurang mengalokasikan dananya untuk belanja yang terkait erat dengan upaya peningkatan ekonomi.

Tabel 3.3. Distribusi Persentase Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Lampung Menurut Jenis Belanja, 2013-2014 (Juta Rupiah)

Jenis Belanja	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	100,00	100,00
Belanja Tidak Langsung	46,64	48,15
Belanja Pegawai	12,81	12,22
Belanja Hibah	19,59	19,03
Belanja Bantuan Sosial	0,14	0,10
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	9,20	16,23
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	4,38	0,45
Belanja Tidak Terduga	0,52	0,12
Belanja Langsung	53,36	51,85
Belanja Pegawai	2,59	2,45
Belanja Barang dan Jasa	30,07	28,62
Belanja Modal	20,70	20,78

3.2. Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

Pembentukan pemekaran daerah kabupaten/kota sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dengan pemekaran daerah pemerintah akan lebih memahami kebutuhan masyarakat setempat. Dengan asumsi bahwa semakin dekat pusat pengambilan keputusan dengan masyarakat, semakin memahami kebutuhan masyarakat setempat, yang pada gilirannya akan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2014, penerimaan daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung tahun 2014 juga mengalami peningkatan. Dibandingkan tahun 2013, penerimaan daerah tahun 2014 naik 10,17 persen dari 3,93 triliun rupiah menjadi 4,32 triliun rupiah. Kenaikan tertinggi diperoleh dari sumber PAD yang naik 13,21 persen dari 1,77 triliun rupiah menjadi 2,01 triliun rupiah di tahun 2014. Sedangkan kenaikan terendah diperoleh dari Dana perimbangan yang naik 6,35 persen dari 1,38 triliun rupiah menjadi 1,47 triliun rupiah di tahun 2014. (Tabel 3.4).

Dibandingkan dengan penerimaan daerah, pengeluaran daerah tahun 2014 mengalami peningkatan 11,33 persen atau mencapai 4,32 triliun rupiah dari sekitar 3,88 triliun rupiah tahun 2013. Apabila dilihat dari strukturnya, kenaikan belanja tidak langsung mengalami peningkatan hingga mencapai 15,98 persen. Adapun belanja langsung yang terkait dengan program tahun 2014 naik 6,95 persen. Peningkatan belanja langsung berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang sangat diperlukan karena merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa jalan menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat semakin terbuka karena anggaran lebih diprioritaskan untuk belanja langsung.

Optimalisasi penggunaan anggaran belanja daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung terhadap realisasi belanja tahun 2014 dapat dilihat dari rasio belanja operasi yang digunakan untuk membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan fisik. Rasio belanja operasi kabupaten/kota se-Provinsi Lampung sebesar 78,80 persen menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat rutin dibandingkan untuk kegiatan pembangunan fisik. Rasio belanja operasi tertinggi yaitu Kabupaten Lampung Timur sebesar 85,82 persen, diikuti Kabupaten

Pringsewu sebesar 84,57 persen, dan Kabupaten Lampung Selatan sebesar 83,61 persen. Sementara itu rasio belanja operasi terendah yaitu Kabupaten Mesuji sebesar 69,28 persen. (Diolah dari Tabel 35 lampiran).

Tabel 3.4. Perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, 2013-2014 (Juta Rupiah)

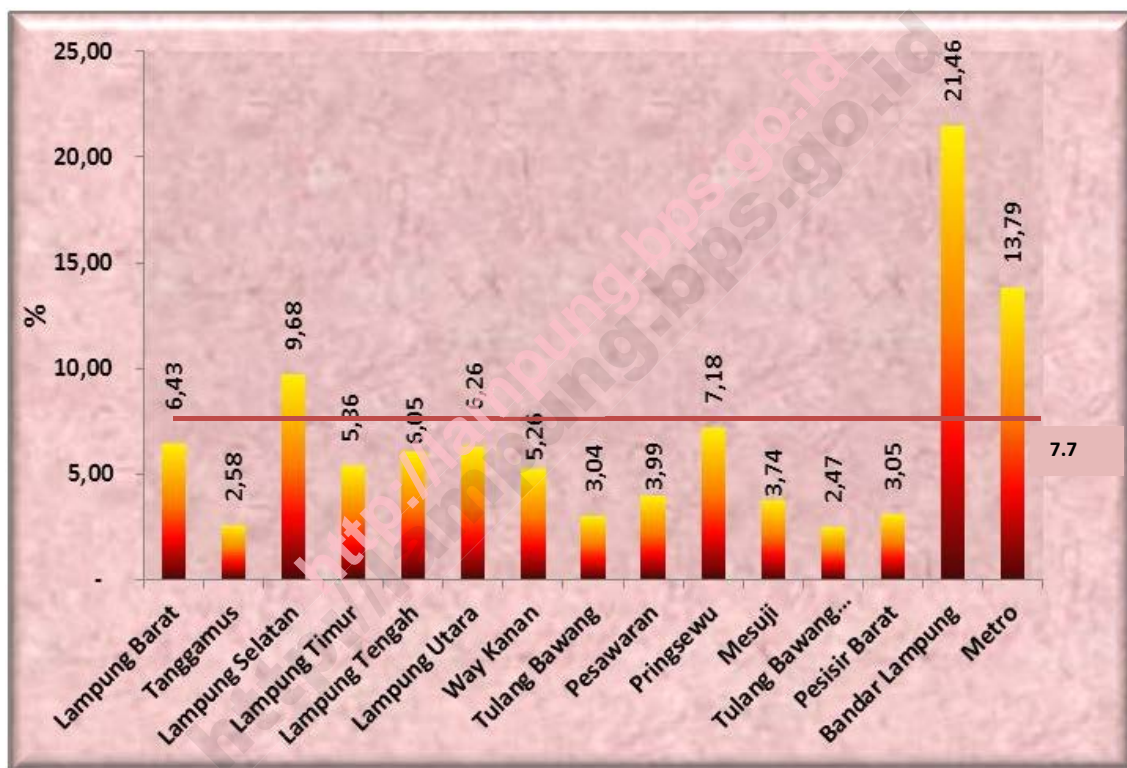
Rincian	2013	2014	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
PENERIMAAN DAERAH	3 925 661 229,00	4 324 705 382,00	10,17
Pendapatan Daerah	3 901 950 614,00	4 298 707 767,00	10,17
Pendapatan Asli Daerah	1 771 297 935,00	2 005 245 670,00	13,21
Dana Perimbangan	1 384 043 537,00	1 471 956 084,00	6,35
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	746 609 142,00	821 506 013,00	10,03
Penerimaan Pembiayaan	23 710 615,00	25 997 615,00	9,65
PENGELUARAN DAERAH	3 884 534 954,00	4 324 705 382,00	11,33
Belanja Tidak Langsung	1 811 879 220,00	2 101 431 890,00	15,98
Belanja Langsung	2 072 655 734,00	2 216 773 492,00	6,95
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	6 500 000,00	100,00

3.2.1. Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

Kontribusi PAD dalam APBD merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan terwujud jika daerah mampu meningkatkan pelayanan dan membiayai pembangunan dari sumber pembiayaan sendiri. Dengan adanya pemekaran wilayah, pemerintah kabupaten/kota optimis mampu meningkatkan PAD, hal ini terlihat dari penerimaan pada pos PAD yang naik hingga 33,09 persen dibandingkan tahun 2013 yaitu dari 882 milyar rupiah menjadi 1,17 trilyun rupiah. Akan tetapi dengan rasio PAD terhadap total pendapatan yang hanya mencapai 7,74 persen menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pemerintah kabupaten/kota masih rendah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. (Tabel 3.4 dan diolah dari Tabel 19 lampiran).

Dari lima belas kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung memiliki rasio PAD tertinggi yaitu 21,46 persen sementara Kabupaten Tulang Bawang Barat rasio PAD-nya paling rendah yaitu 2,47. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung memiliki kemandirian daerah yang paling baik dibanding kabupaten/kota lain. Tingginya kemandirian Kota Bandar Lampung disebabkan oleh tingginya sumber-sumber PAD khususnya dari pajak daerah dan retribusi daerah. (Gambar 3.3).

Gambar 3.3. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, 2014



3.2.2. Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

Pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2014 meningkatkan kontribusi belanja tidak langsung dari 55,04 persen tahun 2013 menjadi 55,66 persen. Sementara itu, untuk belanja langsung pemerintah kabupaten/kota justru mengurangi kontribusinya dari 44,96 persen tahun 2013 menjadi 44,34 persen tahun 2014. Hal tersebut disebabkan komponen belanja modal yang dapat memberikan output lebih bagi pemerintah kabupaten/kota turun menjadi 21,06 persen dari 22,60 persen pada tahun 2013. Dari Tabel 3.5, terlihat rasio belanja pegawai terhadap total belanja masih cukup besar yaitu 50,62 persen tahun 2013 dan 51,15 persen tahun 2014. Hal ini menunjukkan pemerintah kabupaten/kota masih

memiliki kecenderungan mengalokasikan dananya untuk belanja yang sifatnya untuk pendanaan aparatur negara. Apabila pola seperti ini berlanjut untuk waktu yang cukup lama, tujuan adanya pemekaran wilayah untuk mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat akan sulit dicapai.

Tabel 3.5. Distribusi Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung menurut Jenis Belanja, 2013-2014

Jenis Belanja	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	100	100
Belanja Tidak Langsung	55,04	55,66
Belanja Pegawai	50,62	51,15
Belanja Bunga	0,03	0,04
Belanja Subsidi	0,00	0,01
Belanja Hibah	1,45	1,34
Belanja Bantuan Sosial	0,46	0,38
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,01	0,01
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2,31	2,65
Belanja Tidak Terduga	0,17	0,09
Belanja Langsung	44,96	44,34
Belanja Pegawai	4,79	4,95
Belanja Barang dan Jasa	17,57	18,33
Belanja Modal	22,60	21,06

3.3. Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Daerah Provinsi Lampung

Diterapkannya otonomi daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah setempat untuk menggali potensi-potensi sumber keuangan di daerahnya sekaligus dapat mengalokasikan sumber daya kebelanja daerah sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerahnya. Semakin banyak sumber-sumber keuangan yang berhasil digali di suatu daerah, maka hal ini akan meningkatkan pendapatan daerah yang semestinya diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik. Andaiyani (2013) menyatakan bahwa kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik mempengaruhi besarnya belanja modal. Sehingga pemerintah daerah

seharusnya melakukan pergeseran komposisi belanja yang nantinya dapat meningkatkan kepercayaan publik.

Pertumbuhan ekonomi semestinya mampu mendorong pembangunan daerah yang nantinya dapat meningkatnya alokasi belanja modal daerah. Hal ini senada dengan Taiwo & Abayomi (2011) yang mengatakan bahwa antara pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal memiliki hubungan positif. Selama tahun 2012 – 2014, pertumbuhan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada PDRB menurut pengeluaran Provinsi Lampung mengalami peningkatan dari 60,10 miliar rupiah (32,08 persen dari PDRB) pada tahun 2012 menjadi 71,01 miliar rupiah (30,74 persen dari PDRB) pada tahun 2014 dengan rata-rata peningkatan setiap tahunnya sebesar 31,51 persen. (BPS Provinsi Lampung, 2015). Proporsi pertumbuhan komponen PMTB terhadap PDRB cenderung turun. Hal tersebut sejalan dengan rasio belanja modal terhadap total belanja APBD, pada tahun 2012 sebesar 21,68 persen dan cenderung menurun hingga tahun 2014 sebesar 20,77 persen. Sehingga jika pemerintah ingin memperkuat pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan meningkatkan rasio belanja modal pada anggaran belanja daerah. (Diolah dari Tabel 2 lampiran).

TABEL – TABEL LAMPIRAN

<http://lampung.pps.go.id>
<http://lampung.bps.go.id>

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Lampung, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	3 901 950 613,81	4 526 532 292,01
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1 771 297 934,86	2 274 685 572,91
Pajak Daerah	1 547 336 214,79	1 946 452 924,02
Retribusi Daerah	8 672 978,78	9 253 336,15
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25 144 918,79	25 462 864,86
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	190 143 822,50	293 516 447,88
DANA PERIMBANGAN	1 384 043 537,03	1 472 486 568,52
Bagi Hasil Pajak	145 424 014,03	142 641 116,84
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	117 848 110,00	144 940 790,68
Dana Alokasi Umum (DAU)	1 060 663 183,00	1 136 053 041,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	60 108 230,00	48 851 620,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	746 609 141,92	779 360 150,58
Pendapatan Hibah	22 430 145,82	22 926 122,48
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	724 178 996,10	748 609 106,10
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	7 824 922,00

Tabel 2. Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Lampung, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	3 884 534 954,00	4 454 187 317,37
Belanja Tidak Langsung	1 811 879 220,00	2 144 560 814,84
Belanja Pegawai	497 662 948,00	544 114 849,55
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	761 045 629,00	847 424 324,45
Belanja Bantuan Sosial	5 448 514,00	4 521 800,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	357 471 263,00	723 095 812,55
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	170 214 409,00	20 173 866,28
Belanja Tidak Terduga	20 036 457,00	5 230 162,00
Belanja Langsung	2 072 655 734,00	2 309 626 502,54
Belanja Pegawai	100 476 762,00	109 214 896,33
Belanja Barang dan Jasa	1 168 089 647,00	1 274 956 923,03
Belanja Modal	804 089 325,00	925 454 683,17

Tabel 3. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Provinsi Lampung, 2013-2014

(000 Rp)

Jenis Pembiayaan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	23 710 615,00	39 211 205,08
Penerimaan Pembiayaan Daerah	23 710 615,00	41 141 205,08
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	23 710 615,00	41 141 205,08
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	1 930 000,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	1 930 000,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	41 126 275,34	111 556 179,71

Tabel 4. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	854 217 650,87	634 237 104,48
PENDAPATAN ASLI DAERAH	33 829 813,86	40 800 358,95
Pajak Daerah	4 181 820,82	5 754 256,70
Retribusi Daerah	7 752 960,45	1 779 453,56
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2 851 756,20	3 068 337,25
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	19 043 276,39	30 198 311,44
DANA PERIMBANGAN	693 467 851,15	499 309 896,53
Bagi Hasil Pajak	45 630 494,15	28 484 759,53
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	558 555 207,00	388 754 357,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	89 282 150,00	82 070 780,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	126 919 985,86	94 126 849,01
Pendapatan Hibah	28 186 303,00	3 000 000,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	19 113 428,86	34 858 642,01
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	69 620 254,00	56 268 207,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10 000 000,00	0,00

Tabel 5. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	883 820 290,00	872 588 834,43
PENDAPATAN ASLI DAERAH	22 017 450,00	22 488 697,78
Pajak Daerah	7 257 570,00	9 143 084,55
Retribusi Daerah	2 257 466,00	3 969 096,65
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 176 248,00	3 294 264,86
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9 326 166,00	6 082 251,72
DANA PERIMBANGAN	718 182 723,00	804 442 823,02
Bagi Hasil Pajak	28 897 125,00	23 386 775,87
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	17 289 293,00	27 112 031,15
Dana Alokasi Umum (DAU)	600 816 655,00	669 512 156,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	71 179 650,00	84 431 860,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	143 620 117,00	45 657 313,63
Pendapatan Hibah	0,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	20 043 385,00	45 657 313,63
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10 000 000,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	113 576 732,00	151 336 264,67

Tabel 6. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 198 779 827,03	1 348 589 997,90
PENDAPATAN ASLI DAERAH	100 050 587,68	130 597 526,74
Pajak Daerah	40 882 281,85	37 707 645,62
Retribusi Daerah	20 092 411,11	13 014 162,92
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6 252 663,26	6 318 642,72
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	32 823 231,46	73 557 075,48
DANA PERIMBANGAN	900 885 085,34	993 329 427,60
Bagi Hasil Pajak	36 109 332,42	28 136 399,08
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	17 726 138,92	21 064 307,53
Dana Alokasi Umum (DAU)	769 867 834,00	847 657 151,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	77 181 780,00	96 471 570,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	197 844 154,01	224 663 043,56
Pendapatan Hibah	0,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	28 548 992,01	62 406 896,56
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	139 295 162,00	162 256 147,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	30 000 000,00	0,00

Tabel 7. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 366 894 069,59	1 550 572 554,24
PENDAPATAN ASLI DAERAH	40 761 198,16	83 131 971,56
Pajak Daerah	13 669 599,29	24 379 040,98
Retribusi Daerah	4 542 174,62	5 618 163,73
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1 971 382,89	1 947 448,21
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	20 578 041,36	51 187 318,64
DANA PERIMBANGAN	1 073 833 635,83	1 156 884 045,51
Bagi Hasil Pajak	81 815 932,22	0,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	69 497 328,61	150 380 012,51
Dana Alokasi Umum (DAU)	860 136 385,00	940 041 243,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	62 383 990,00	66 462 790,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	252 299 235,60	310 556 537,17
Pendapatan Hibah	0,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	37 616 612,13	60 035 523,77
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	214 682 623,47	250 521 013,40
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00

Tabel 8. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 613 953 783,00	1 789 233 628,03
PENDAPATAN ASLI DAERAH	81 780 244,00	108 180 987,62
Pajak Daerah	38 326 654,00	40 290 414,76
Retribusi Daerah	7 964 820,00	33 673 876,08
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6 350 501,00	6 427 622,38
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	29 138 269,00	27 789 074,40
DANA PERIMBANGAN	1 251 072 112,00	1 329 265 207,22
Bagi Hasil Pajak	54 117 266,00	42 669 940,43
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	17 644 967,00	25 612 484,78
Dana Alokasi Umum (DAU)	1 086 335 279,00	1 177 513 282,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	92 974 600,00	83 469 500,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	281 101 427,00	351 787 433,20
Pendapatan Hibah	0,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	32 745 365,00	76 736 498,20
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	247 981 062,00	275 050 935,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	375 000,00	0,00

Tabel 9. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 114 467 058,11	1 292 431 677,52
PENDAPATAN ASLI DAERAH	46 626 054,96	80 918 349,92
Pajak Daerah	10 701 983,08	16 190 430,17
Retribusi Daerah	16 324 815,30	4 775 117,04
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4 082 396,58	5 359 031,05
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15 516 860,00	54 593 771,66
DANA PERIMBANGAN	896 610 922,06	973 140 651,23
Bagi Hasil Pajak	29 965 921,32	24 293 307,87
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	13 271 516,74	20 870 344,36
Dana Alokasi Umum (DAU)	761 218 384,00	838 661 589,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	92 155 100,00	89 315 410,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	171 230 081,09	238 372 676,37
Pendapatan Hibah	0,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	23 722 693,12	52 767 170,49
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	137 835 471,59	185 605 505,88
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	7 500 000,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2 171 916,38	0,00

Tabel 10. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	778 377 731,71	871 294 716,36
PENDAPATAN ASLI DAERAH	24 831 167,99	45 811 422,79
Pajak Daerah	7 304 111,16	13 836 375,47
Retribusi Daerah	7 902 692,01	19 320 790,90
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1 638 283,81	2 454 645,54
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7 986 081,01	10 199 610,88
DANA PERIMBANGAN	651 613 183,34	701 026 300,81
Bagi Hasil Pajak	32 265 052,19	24 470 755,99
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	17 197 625,15	21 170 453,82
Dana Alokasi Umum (DAU)	517 219 746,00	573 114 161,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	84 930 760,00	82 270 930,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	101 933 380,38	124 456 992,77
Pendapatan Hibah	0,00	0,00
Dana Darurat	0,00	
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	27 702 524,38	45 650 925,77
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	74 230 856,00	78 804 967,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Lainnya	3 600,00	1 100,00

Tabel 11. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	688 379 955,75	804 796 952,53
PENDAPATAN ASLI DAERAH	36 242 825,98	24 444 892,15
Pajak Daerah	6 499 367,93	13 175 797,96
Retribusi Daerah	19 804 396,00	2 915 095,52
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3 483 656,75	3 520 417,06
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6 455 405,30	4 833 581,62
DANA PERIMBANGAN	593 814 060,84	649 804 534,37
Bagi Hasil Pajak	44 759 774,65	35 082 992,23
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	13 527 656,19	21 679 798,14
Dana Alokasi Umum (DAU)	482 230 950,00	533 313 684,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	53 295 680,00	59 728 060,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	58 323 068,93	130 547 526,00
Pendapatan Hibah	0,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	8 517 987,34	48 921 632,11
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Lainnya	49 805 081,59	81 625 893,89

Tabel 12. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	782 644 598,28	913 575 380,53
PENDAPATAN ASLI DAERAH	25 933 059,04	36 482 436,46
Pajak Daerah	6 041 572,49	8 154 156,96
Retribusi Daerah	1 885 582,61	1 854 086,44
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	162 262,20	245 351,32
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17 843 641,74	26 228 841,74
DANA PERIMBANGAN	642 231 250,59	739 876 226,10
Bagi Hasil Pajak	19 985 422,46	14 620 113,67
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	17 322 823,13	20 957 158,43
Dana Alokasi Umum (DAU)	538 309 950,00	625 845 694,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	66 613 055,00	78 453 260,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	114 480 288,65	137 216 717,97
Pendapatan Hibah	0,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	30 604 140,65	39 987 237,97
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	83 876 148,00	97 229 480,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00

Tabel 13. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	784 516 227,00	881 912 476,11
PENDAPATAN ASLI DAERAH	30 421 121,00	63 339 740,42
Pajak Daerah	8 476 107,00	11 279 888,98
Retribusi Daerah	2 446 590,00	2 299 715,26
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	43 412,00	450 754,72
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	19 455 012,00	49 309 381,46
DANA PERIMBANGAN	592 098 364,00	632 686 845,28
Bagi Hasil Pajak	17 642 063,00	16 998 922,27
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	17 492 653,00	20 833 427,02
Dana Alokasi Umum (DAU)	499 454 898,00	547 622 366,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	57 508 750,00	47 232 130,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	161 996 742,00	185 885 890,40
Pendapatan Hibah	0,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	16 130 107,00	35 618 895,40
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	125 828 974,00	150 266 995,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	20 000 000,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	37 661,00	0,00

Tabel 14. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mesuji, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	464 241 865,59	558 296 638,63
PENDAPATAN ASLI DAERAH	10 021 181,59	20 901 990,43
Pajak Daerah	1 186 116,00	4 321 789,59
Retribusi Daerah	1 492 603,00	3 942 802,18
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	402 635,73	406 884,44
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6 939 826,86	12 230 514,24
DANA PERIMBANGAN	413 956 697,00	476 213 538,98
Bagi Hasil Pajak	18 115 279,00	13 986 195,34
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	17 113 392,00	22 723 313,64
Dana Alokasi Umum (DAU)	338 570 276,00	387 694 110,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	40 157 750,00	51 809 920,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	40 263 987,00	61 181 109,21
Pendapatan Hibah	0,00	2 000 000,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	5 780 384,00	32 174 793,21
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	19 483 603,00	27 006 316,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	15 000 000,00	0,00

**Tabel 15. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
2013-2014**

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	562 451 471,82	624 649 941,27
PENDAPATAN ASLI DAERAH	10 345 128,35	15 436 104,69
Pajak Daerah	5 756 423,66	6 788 944,97
Retribusi Daerah	882 736,26	1 195 256,30
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	201 317,87	406 884,44
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3 504 650,56	7 045 018,99
DANA PERIMBANGAN	464 258 951,25	509 035 368,24
Bagi Hasil Pajak	17 624 730,45	13 395 650,39
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	17 072 882,80	20 805 783,84
Dana Alokasi Umum (DAU)	380 947 218,00	424 389 404,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	48 614 120,00	50 444 530,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	87 847 392,22	100 178 468,34
Pendapatan Hibah	1 000 000,00	1 500 000,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	14 873 656,22	33 853 630,05
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	46 973 736,00	59 026 620,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	25 000 000,00	0,00
Lainnya	5 933 797,66	5 798 218,29

Tabel 16. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	0,00	339 667 661,27
PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	10 373 342,75
Pajak Daerah	0,00	2 238 704,07
Retribusi Daerah	0,00	6 063 116,50
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	2 071 522,18
DANA PERIMBANGAN	0,00	250 299 171,51
Bagi Hasil Pajak	0,00	8 655 517,33
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	9 627 027,17
Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	227 314 157,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	0,00	4 702 470,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	78 995 147,02
Pendapatan Hibah	0,00	10 000 000,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	32 457 255,02
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	36 537 892,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00

Tabel 17. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	1 660 482 745,73	1 839 004 647,11
PENDAPATAN ASLI DAERAH	360 698 350,13	394 646 889,45
Pajak Daerah	242 651 752,33	246 167 925,21
Retribusi Daerah	50 651 293,80	45 920 496,94
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8 237 246,37	13 206 503,30
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	59 158 057,63	89 351 963,99
DANA PERIMBANGAN	992 895 543,89	1 040 433 426,63
Bagi Hasil Pajak	45 783 277,46	54 643 065,13
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	17 267 575,43	21 121 790,50
Dana Alokasi Umum (DAU)	864 816 641,00	921 826 931,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	65 028 050,00	42 841 640,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	306 888 851,71	403 924 331,04
Pendapatan Hibah	6 581 753,88	41 796 053,52
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	53 548 302,83	85 684 220,52
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	221 758 795,00	250 170 293,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	25 000 000,00	0,00
Lainnya	0,00	26 273 764,00

Tabel 18. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Metro, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pendapatan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	604 188 390,42	705 744 010,78
PENDAPATAN ASLI DAERAH	59 224 528,01	97 307 834,64
Pajak Daerah	11 291 481,10	12 651 879,44
Retribusi Daerah	4 980 519,05	5 417 625,67
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2 884 797,83	3 389 937,35
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	40 067 730,03	75 848 392,17
DANA PERIMBANGAN	450 919 469,89	487 715 129,64
Bagi Hasil Pajak	22 968 640,09	18 206 944,80
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	17 072 882,80	20 805 783,84
Dana Alokasi Umum (DAU)	374 201 187,00	414 624 161,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	36 676 760,00	34 078 240,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	94 044 392,52	120 721 046,50
Pendapatan Hibah	0,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	23 420 367,31	36 285 142,85
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	69 290 881,00	77 989 976,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Lainnya	1 333 144,21	6 445 927,65

**Tabel 19. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
2013-2014**

(000 Rp)

Jenis Pendapatan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
PENDAPATAN DAERAH	13 190 491 129,72	15 177 932 485,86
PENDAPATAN ASLI DAERAH	882 782 710,75	1 174 862 546,34
Pajak Daerah	404 226 840,71	452 080 335,43
Retribusi Daerah	148 981 060,21	151 758 855,68
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	41 738 560,49	50 496 724,63
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	287 836 249,34	520 526 630,60
DANA PERIMBANGAN	10 335 839 850,18	11 243 462 592,67
Bagi Hasil Pajak	495 680 310,41	347 031 339,92
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	269 496 734,77	424 763 716,74
Dana Alokasi Umum (DAU)	8 632 680 610,00	9 517 884 446,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	937 982 195,00	953 783 090,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1 971 868 568,79	2 759 607 346,85
Pendapatan Hibah	35 768 056,88	58 296 053,52
Dana Darurat	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya	342 367 945,85	723 095 777,55
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1 450 857 566,06	1 706 734 347,28
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	142 875 000,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	172 861 932,84	271 481 168,50

Tabel 20. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	847 853 084,20	627 029 312,03
Belanja Tidak Langsung	450 952 895,12	331 242 824,56
Belanja Pegawai	378 010 992,87	293 326 733,59
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	35 522 004,00	13 880 654,00
Belanja Bantuan Sosial	7 600 400,00	2 310 300,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	461 307,05	486 108,25
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	28 808 913,20	20 903 070,72
Belanja Tidak Terduga	549 278,00	335 958,00
Belanja Langsung	396 900 189,08	295 786 487,47
Belanja Pegawai	30 768 879,45	35 837 267,76
Belanja Barang dan Jasa	120 147 927,35	99 667 447,39
Belanja Modal	245 983 382,28	160 281 772,32

Tabel 21. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tanggamus, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	899 020 848,00	993 881 456,25
Belanja Tidak Langsung	492 666 081,00	551 837 952,97
Belanja Pegawai	452 227 070,00	502 580 079,72
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	250 000,00	250 000,00
Belanja Hibah	15 940 601,00	20 275 496,43
Belanja Bantuan Sosial	954 756,00	2 249 285,65
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	20 858 352,00	22 094 134,67
Belanja Tidak Terduga	2 435 302,00	4 388 956,50
Belanja Langsung	406 354 767,00	442 043 503,28
Belanja Pegawai	34 474 020,00	38 713 368,45
Belanja Barang dan Jasa	145 030 213,00	167 141 470,35
Belanja Modal	226 850 534,00	236 188 664,48

Tabel 22. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	1 140 463 713,93	1 263 321 080,30
Belanja Tidak Langsung	641 962 217,96	747 603 115,38
Belanja Pegawai	628 678 949,46	694 766 263,68
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	13 283 268,50	23 968 879,20
Belanja Bantuan Sosial	0,00	1 560 500,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	26 324 701,00
Belanja Tidak Terduga	0,00	982 771,50
Belanja Langsung	498 501 495,97	515 717 964,92
Belanja Pegawai	54 422 405,81	65 836 782,05
Belanja Barang dan Jasa	218 946 030,77	243 823 952,47
Belanja Modal	225 133 059,39	206 057 230,41

Tabel 23. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	1 410 275 163,13	1 512 492 030,22
Belanja Tidak Langsung	888 518 493,50	938 748 771,23
Belanja Pegawai	777 912 583,95	798 684 384,01
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	250 000,00
Belanja Hibah	15 081 377,05	14 151 876,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	4 202 006,02
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	99 702,50	112 689,70
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	95 345 054,00	120 897 646,90
Belanja Tidak Terduga	79 776,00	450 168,60
Belanja Langsung	521 756 669,63	573 743 258,99
Belanja Pegawai	59 132 690,55	58 469 739,06
Belanja Barang dan Jasa	245 653 501,40	301 550 350,54
Belanja Modal	216 970 477,68	213 723 169,39

Tabel 24. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, 2013-2014

(000 Rp)

Jenis Belanja	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	1 612 488 000,00	1 724 090 117,47
Belanja Tidak Langsung	1 011 028 776,00	1 117 485 168,86
Belanja Pegawai	960 083 140,00	1 055 867 377,00
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	3 931 535,00	17 498 521,00
Belanja Bantuan Sosial	10 327 900,00	2 599 500,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	36 332 151,00	39 271 080,86
Belanja Tidak Terduga	354 050,00	2 248 690,00
Belanja Langsung	601 459 224,00	606 604 948,61
Belanja Pegawai	65 936 504,00	46 780 836,22
Belanja Barang dan Jasa	236 392 643,00	206 335 347,43
Belanja Modal	299 130 077,00	353 488 764,96

Tabel 25. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	1 109 303 360,95	1 163 202 313,49
Belanja Tidak Langsung	675 473 409,71	726 332 701,12
Belanja Pegawai	641 447 296,29	712 508 161,30
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	20 921 995,00	542 000,00
Belanja Bantuan Sosial	5 647 500,00	5 600 500,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	119 547,42	92 101,82
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6 992 493,00	6 992 488,00
Belanja Tidak Terduga	344 578,00	597 450,00
Belanja Langsung	433 829 951,24	436 869 612,37
Belanja Pegawai	50 522 255,23	65 414 437,75
Belanja Barang dan Jasa	143 051 876,06	157 367 625,23
Belanja Modal	240 255 819,95	214 087 549,39

Tabel 26. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Way Kanan, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	757 542 651,31	845 628 401,73
Belanja Tidak Langsung	396 951 459,08	436 086 120,05
Belanja Pegawai	363 199 973,33	393 417 642,91
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	7 850 450,00	11 977 460,00
Belanja Bantuan Sosial	3 938 500,00	4 919 500,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	21 536 109,75	25 743 945,14
Belanja Tidak Terduga	426 426,00	27 572,00
Belanja Langsung	360 591 192,23	409 542 281,68
Belanja Pegawai	28 133 053,00	28 528 346,70
Belanja Barang dan Jasa	130 824 143,03	148 746 461,24
Belanja Modal	201 633 996,20	232 267 473,74

Tabel 27. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	696 002 596,62	776 125 961,71
Belanja Tidak Langsung	344 484 568,05	359 644 712,19
Belanja Pegawai	287 316 689,56	310 761 239,21
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	342 470,74	670 812,22
Belanja Hibah	7 635 390,00	10 042 500,00
Belanja Bantuan Sosial	1 320 000,00	227 500,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	47 546 629,25	37 463 360,77
Belanja Tidak Terduga	323 388,50	479 300,00
Belanja Langsung	351 518 028,57	416 481 249,53
Belanja Pegawai	45 121 705,87	55 977 285,00
Belanja Barang dan Jasa	161 882 155,70	186 645 481,53
Belanja Modal	144 514 167,00	173 858 483,00

Tabel 28. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	822 745 409,18	930 780 038,47
Belanja Tidak Langsung	392 528 559,40	454 323 514,26
Belanja Pegawai	366 021 993,00	420 102 540,49
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	7 277 200,00	7 960 456,67
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	19 229 366,40	26 260 517,10
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00
Belanja Langsung	430 216 849,78	476 456 524,21
Belanja Pegawai	45 549 770,25	58 308 291,00
Belanja Barang dan Jasa	144 439 049,35	155 633 706,52
Belanja Modal	240 228 030,18	262 514 526,69

Tabel 29. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	772 327 158,00	840 212 481,49
Belanja Tidak Langsung	455 433 128,00	540 779 248,05
Belanja Pegawai	436 256 505,00	504 222 828,10
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	9 660 250,00	23 060 220,00
Belanja Bantuan Sosial	759 250,00	4 901 500,86
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	8 545 123,00	8 569 199,09
Belanja Tidak Terduga	212 000,00	25 500,00
Belanja Langsung	316 894 030,00	299 433 233,44
Belanja Pegawai	32 016 240,00	32 855 073,53
Belanja Barang dan Jasa	119 087 082,00	136 927 718,37
Belanja Modal	165 790 708,00	129 650 441,55

Tabel 30. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Mesuji, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	451 836 408,81	517 734 653,43
Belanja Tidak Langsung	166 967 591,81	187 863 955,03
Belanja Pegawai	133 508 517,00	148 861 853,85
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	3 740 000,00	5 106 800,00
Belanja Bantuan Sosial	16 507 290,69	14 565 000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	12 483 354,12	17 657 088,62
Belanja Tidak Terduga	728 430,00	1 673 212,55
Belanja Langsung	284 868 817,00	329 870 698,40
Belanja Pegawai	36 838 609,00	33 464 738,90
Belanja Barang dan Jasa	97 370 695,00	139 016 144,32
Belanja Modal	150 659 513,00	157 389 815,18

**Tabel 31. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
2013-2014**

	(000 Rp)	
Jenis Belanja	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	565 054 667,23	576 692 368,01
Belanja Tidak Langsung	233 145 191,43	247 863 243,22
Belanja Pegawai	214 019 545,64	227 554 025,18
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	6 261 125,00	4 275 948,25
Belanja Bantuan Sosial	250 000,00	433 020,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	12 614 520,79	15 600 249,79
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00
Belanja Langsung	331 909 475,80	328 829 124,80
Belanja Pegawai	37 089 268,55	33 714 257,00
Belanja Barang dan Jasa	111 209 491,52	129 562 913,19
Belanja Modal	183 610 715,73	165 551 954,61

Tabel 32. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	0,00	276 015 491,78
Belanja Tidak Langsung	0,00	153 576 165,02
Belanja Pegawai	0,00	134 944 538,57
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	2 545 000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	220 723,95
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	15 852 637,50
Belanja Tidak Terduga	0,00	13 265,00
Belanja Langsung	0,00	122 439 326,76
Belanja Pegawai	0,00	7 244 517,90
Belanja Barang dan Jasa	0,00	40 208 943,58
Belanja Modal	0,00	74 985 865,28

Tabel 33. Realisasi Belanja Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	1 780 300 660,34	1 799 475 905,42
Belanja Tidak Langsung	939 950 189,46	944 850 740,18
Belanja Pegawai	872 300 872,18	903 931 706,44
Belanja Bunga	4 262 522,51	6 392 664,54
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	30 830 590,00	23 348 257,50
Belanja Bantuan Sosial	14 881 503,93	9 312 387,71
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	734 132,00	732 724,00
Belanja Tidak Terduga	16 940 568,84	1 133 000,00
Belanja Langsung	840 350 470,88	854 625 165,23
Belanja Pegawai	89 291 806,75	132 123 226,93
Belanja Barang dan Jasa	351 609 822,03	368 311 410,15
Belanja Modal	399 448 842,10	354 190 528,15

Tabel 34. Realisasi Belanja Pemerintah Kota Metro, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	609 265 220,46	693 309 716,71
Belanja Tidak Langsung	326 819 012,13	354 808 007,56
Belanja Pegawai	309 198 254,85	335 111 942,15
Belanja Bunga	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00
Belanja Hibah	17 009 026,50	18 504 985,72
Belanja Bantuan Sosial	70 000,00	5 000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	473 064,42	1 117 413,32
Belanja Tidak Terduga	68 666,36	68 666,36
Belanja Langsung	282 446 208,33	338 501 709,15
Belanja Pegawai	35 527 540,81	26 195 306,32
Belanja Barang dan Jasa	142 473 794,58	184 607 655,60
Belanja Modal	104 444 872,94	127 698 747,23

**Tabel 35. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung
2013-2014**

(000 Rp)		
Jenis Belanja	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Belanja Daerah	13 474 478 942,16	14 539 991 328,51
Belanja Tidak Langsung	7 416 881 572,65	8 093 046 239,68
Belanja Pegawai	6 820 182 383,13	7 436 641 316,21
Belanja Bunga	4 262 522,51	6 392 664,54
Belanja Subsidi	592 470,74	1 170 812,22
Belanja Hibah	194 944 812,05	194 594 054,76
Belanja Bantuan Sosial	62 257 100,62	55 431 000,24
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	680 556,97	911 623,72
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	311 499 262,93	385 480 257,48
Belanja Tidak Terduga	22 462 463,70	12 424 510,51
Belanja Langsung	6 057 597 369,51	6 446 945 088,83
Belanja Pegawai	644 824 749,27	719 463 474,57
Belanja Barang dan Jasa	2 368 118 424,79	2 665 546 627,90
Belanja Modal	3 044 654 195,45	3 061 934 986,36

Tabel 36. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	83 831 419,00	66 315 006,00
Penerimaan Pembiayaan Daerah	84 500 784,00	66 870 224,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	84 500 784,00	66 870 224,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	669 365,00	555 218,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	500 000,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	169 365,00	555 218,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	63 758 238,00	42 447 400,11

Tabel 37. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tanggamus, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	23 767 187,00	(22 576 537,28)
Penerimaan Pembiayaan Daerah	39 430 830,00	8 566 626,31
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	39 430 830,00	8 566 626,31
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	15 663 643,00	31 143 163,59
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	900 000,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	14 763 643,00	31 143 163,59
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	8 566 628,00	7 467 105,57

**Tabel 38. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
2013-2014**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	109 591 125,97	101 959 501,46
Penerimaan Pembiayaan Daerah	117 139 628,00	117 141 988,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	117 139 628,00	117 139 628,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	2 360,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7 548 502,03	15 182 486,54
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	7 548 502,03	15 182 486,54
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	117 139 628,01	187 228 419,07

Tabel 39. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	105 073 557,19	60 529 369,17
Penerimaan Pembiayaan Daerah	108 073 557,19	61 637 579,32
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	108 073 557,19	61 637 579,32
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3 000 000,00	1 108 210,15
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1 000 000,00	1 000 000,00
Pembayaran Pokok Utang	2 000 000,00	108 210,15
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	61 582 123,63	98 609 893,19

**Tabel 40. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
2013-2014**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	97 916 800,00	76 294 461,61
Penerimaan Pembiayaan Daerah	117 500 087,00	99 460 383,95
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	117 500 087,00	99 382 583,95
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	77 800,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	19 583 287,00	23 165 922,33
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	1 000 000,00
Pembayaran Pokok Utang	19 583 287,00	22 165 922,33
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	99 382 583,00	142 437 972,18

Tabel 41. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	35 870 392,98	35 994 373,58
Penerimaan Pembiayaan Daerah	40 070 392,98	40 249 925,49
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	40 070 392,98	41 034 090,14
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	(784 164,65)
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4 200 000,00	4 255 551,91
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3 000 000,00	3 500 000,00
Pembayaran Pokok Utang	1 200 000,00	755 551,91
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	41 034 090,14	165 223 737,61

Tabel 42. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Way Kanan, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	57 466 512,17	70 205 662,51
Penerimaan Pembiayaan Daerah	62 093 260,79	78 331 022,48
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	62 093 260,79	78 305 192,48
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	25 830,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4 626 748,62	8 125 359,98
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1 750 000,00	1 250 000,00
Pembayaran Pokok Utang	2 876 748,62	6 875 359,98
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	78 305 192,48	95 871 977,14

Tabel 43. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	26 437 986,49	2 925 274,05
Penerimaan Pembiayaan Daerah	40 981 094,86	18 787 957,03
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	22 646 249,35	18 787 957,03
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	18 334 845,51	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	14 543 108,37	15 862 682,98
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	375 000,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	15 862 682,98
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	14 168 108,37	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	18 518 345,64	806 946 100,61

Tabel 44. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	(12 643 467,98)	77 434 500,80
Penerimaan Pembiayaan Daerah	0,00	90 243 865,01
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	90 243 865,01
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	12 643 467,98	12 809 364,21
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	12 809 364,21
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	12 643 467,98	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	(52 744 278,89)	60 229 842,86

Tabel 45. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	26 578 525,00	(6 988 550,00)
Penerimaan Pembiayaan Daerah	33 909 490,00	6 267 863,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	33 909 490,00	38 556 047,26
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7 330 965,00	13 256 413,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	392 175,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	6 938 790,00	8 032 388,96
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	38 767 594,00	72 223 652,92

Tabel 46. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Mesuji, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	42 941 050,00	31 232 722,30
Penerimaan Pembiayaan Daerah	51 773 639,00	32 079 630,50
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	51 773 639,00	32 079 630,50
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	8 832 589,00	846 908,20
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	8 832 589,00	846 908,20
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	68 558 290,00	71 794 707,50

**Tabel 47. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
2013-2014**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	3 691 321,54	7 021 923,78
Penerimaan Pembiayaan Daerah	23 855 294,68	7 021 923,78
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	23 855 294,68	7 021 923,78
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
		0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	20 163 973,14	0,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9 500 000,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	10 663 973,14	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	7 021 923,78	613 996 758,65

Tabel 48. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	0,00	508 331 544,52
Penerimaan Pembiayaan Daerah	0,00	508 331 544,52
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	508 331 544,52
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0,00	339 899 977,32

Tabel 49. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2013-2014

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	127 402 141,30	51 459 709 536,57
Penerimaan Pembiayaan Daerah	142 291 136,77	51 511 184 766,77
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	90 097 476,66	35 954 566,77
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	52 193 660,11	51 475 230 200,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	14 888 995,47	51 475 230,20
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	17 992 740,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8 500 000,00	33 482 490,20
Pembayaran Pokok Utang	6 388 995,47	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	35 954 566,77	1 821 684 507,78

Tabel 50. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kota Metro, 2013-2014

Jenis Pembiayaan	(000 Rp)	
	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	62 483 985,03	36 104 037,45
Penerimaan Pembiayaan Daerah	64 431 855,70	39 197 414,36
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	64 361 826,81	71 532 816,86
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	70 028,89	14 174,33
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1 947 870,67	3 093 376,91
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1 000 000,00	1 000 000,00
Pembayaran Pokok Utang	947 870,67	100 000,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya.....	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	57 714 800,03	82 881 285,26

**Tabel 51. Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
2013-2014**

(000 Rp)		
Jenis Pembiayaan	2013	2014
(1)	(2)	(3)
Pembiayaan	738 048 979,35	52 569 296 483,84
Penerimaan Pembiayaan Daerah	873 857 390,86	52 750 010 475,62
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	855 452 516,46	1 275 444 275,93
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	70 028,89	120 164,33
Penerimaan Piutang Daerah	18 334 845,51	0,00
Lainnya	52 193 660,11	51 474 446 035,35
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	135 808 411,51	180 713 991,77
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	17 992 740,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	26 917 175,00	41 232 490,20
Pembayaran Pokok Utang	81 913 763,93	114 437 256,85
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Lainnya	26 811 576,35	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	133 036 622,56	4 156 069 238,69

DAFTAR PUSTAKA

Andaiyani. 2013. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Operasional Terhadap Jumlah Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 1(1).

BPS Provinsi Lampung. 2015. Statistik Daerah Provinsi Lampung 2015.

BPS Provinsi Lampung. 2015. PDRB Menurut Pengeluaran (Tahun Dasar 2010) Provinsi Lampung 2010-2014.

Pemerintah Provinsi Lampung. 2015. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 (*Audited*).

<http://lampung.bps.go.id>
<http://lampung.bps.go.id>